

**KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BANJIR
BERBASIS KOMUNITAS DI KECAMATAN TEUNOM
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**INTAN KARNIA SARI
NIM.190802094**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BANJIR
BERBASIS KOMUNITAS DI KECAMATAN TEUNOM
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**INTAN KARNIA SARI
NIM.190802094**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

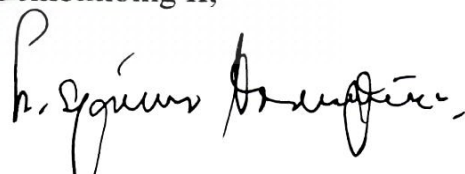
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP.199002282018032001

Pembimbing II,



Hijrah Saputra, S.Fil.I, M.Sos
NIP.199007212020121016

**KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BANJIR
BERBASIS KOMUNITAS DI KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN
ACEH JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

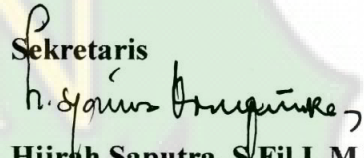
Pada Hari/Tanggal : Senin/10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

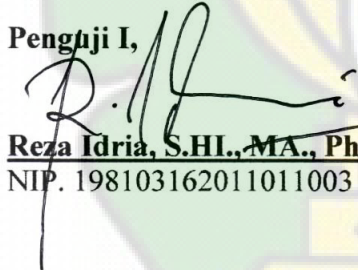
Ketua


Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

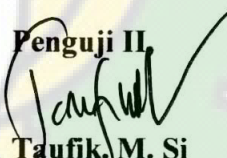
Sekretaris


Hijrah Saputra, S.Fil.I, M.Sos
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Reza Idria, S.HI., MA., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

Penguji II,


Taufik, M. Si
NIDN. 2018058903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Intan Karnia Sari
NIM : 190802094
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Panton, 17 April 2000
Alamat : Desa panton, Kecamatan Teunom,

Kabupaten Aceh Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan



INTAN KARNIA SARI
NIM. 190802094

ABSTRAK

Dalam sepuluh tahun terakhir bencana alam seperti longsor, gempa bumi, maupun banjir bandang masih banyak terjadi di beberapa kawasan yang ada di wilayah Aceh. Tercatat banjir yang melanda di beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Jaya dimana 3.736 jiwa terpapar banjir sejak dari tahun 2015 sampai saat ini. Wajar bila kemudian Kabupaten Aceh Jaya masuk dalam kawasan intensitas tinggi di saat bencana banjir. Mekanisme Penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih terfokus pada aspek bantuan sosial, belum mampu menjadi kebijakan yang terintegrasi dalam penanganan banjir yang sering terjadi di Kecamatan Teunom. Penelitian ini bertujuan untuk melihat: *Pertama*, Bagaimana Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. *Kedua*, Bagaimana Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam Penanggulangan banjir. *Ketiga*, Bagaimana Kebijakan Sosial Penanggulangan banjir berbasis komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dari wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penanggulangan bencana banjir yang dilakukan dengan setting kebijakan yang terfokus pada tahapan pra bencana yang berupa adanya sosialisasi terkait bahaya banjir dan pembagian brosur bahaya banjir, saat bencana pemerintah dan masyarakat melakukan penanggulangan serta membantu masyarakat yang terdampak banjir, kemudian pasca bencana pemerintah dan masyarakat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang difokuskan pada perbaikan bangunan yang rusak. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dilakukan sebagai bentuk mitigasi struktural dan juga mitigasi non struktural yang berupa pemberitaan bencana banjir di desa-desa melalui pengumuman masjid, serta pembuatan pondasi rumah yang tinggi di kawasan rawan banjir. Kebijakan sosial penanggulangan banjir berupa penjaminan hak masyarakat dalam bentuk penyediaan tempat tinggal sementara serta pendataan kerugian material untuk mendapatkan bantuan pasca bencana.

Kata Kunci: *Kebijakan Sosial, Penanggulangan Banjir, Berbasis Komunitas.*

KATA PENGANTAR

Assalamualalaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran, leluatan, dan hidayah serta ilmu pengetahuan kepada penulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam nabi besar Muhammad SAW. Beserta para sahabat dan keluarga sekalian yang telah berjuang membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis skripsi yang berjudul **“Kebijakan Sosial Penanggulangan banjir Berbasis Komunitas Di kecamatan Teunom Kabupaten Aceh jaya”** yang di maksud sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 dan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada program studi Ilmu Administrasi Negara Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada penulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terima kasih kepada Allah SWT, Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan penulis mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta dan tersayang ayahanda M. Yunus Bintang S.E. dan Ibunda Suriaty yang telah memberikan support dan semangat dan kasih sayang yang sangat besar demi keberhasilan penulis.
2. Teruntuk Keluarga penulis kakak Silvia Sari S.P dan adik salwa oktarina fitria sari yang selalu mendengar keluh kesah penulis.
3. Terima kasih kepada my partner Riski Aulia A,md yang telah menemani dari PBAK sampai penulisan karya tulis ini selesai, Terima kasih waktu dan dukungannya.
4. Prof Dr. MujiburRahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. Rasa hormat dan terima kasih saya kepada Ibu Siti Nur Zalika, M.Si. dan Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku dosen pembimbing

yang telah banyak mengulurkan waktu, ide-ide serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

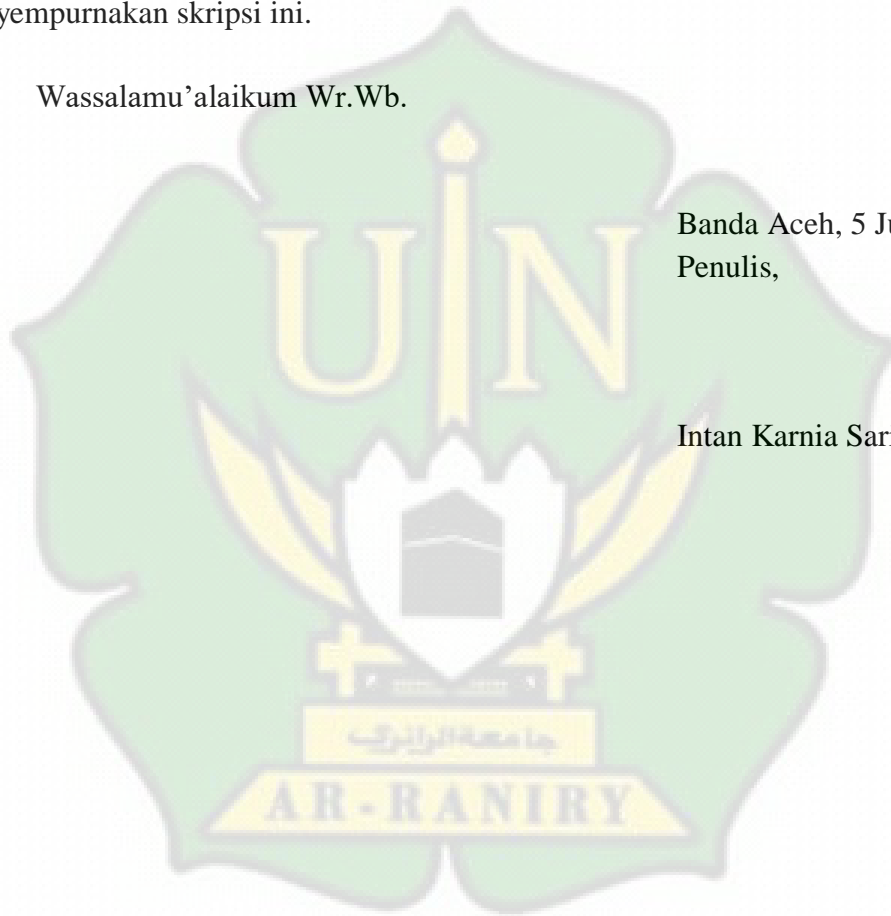
8. Teruntuk sahabat-sahabat Nur Khairiaty S.IP, Nasria S.Farm, Sulviana, Nadhila Sufa, Tiara Khania ramadhini, Nurul Afrah, yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, 5 Juli 2023
Penulis,

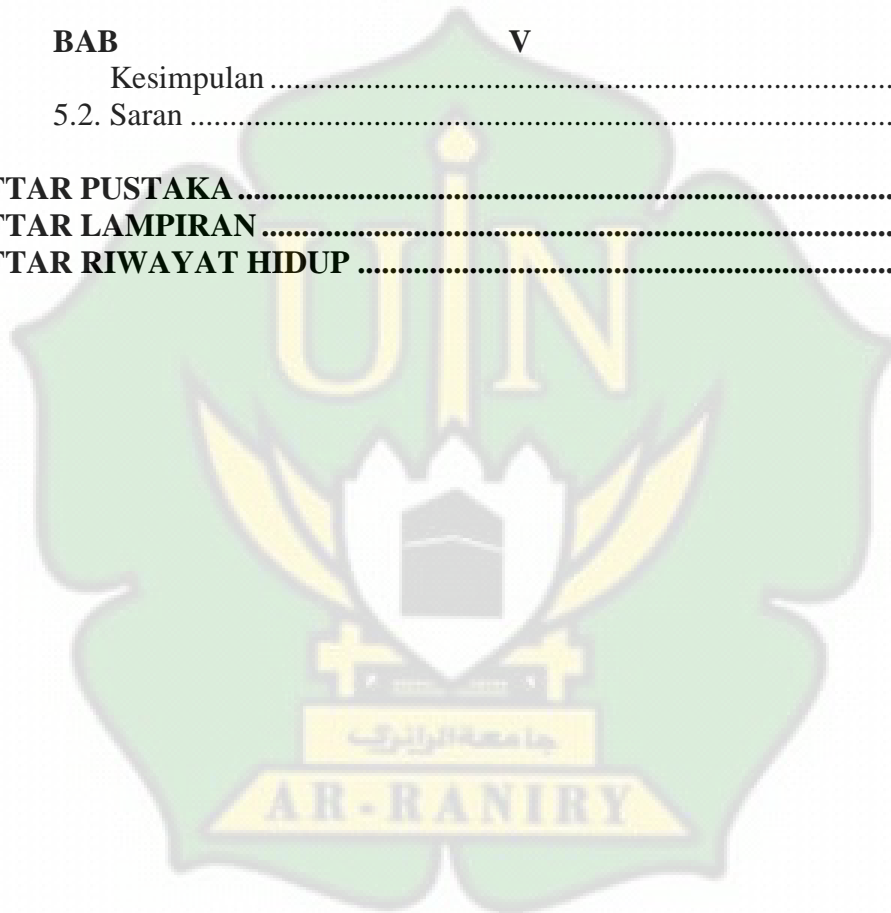
Intan Karnia Sari



DAFTAR ISI

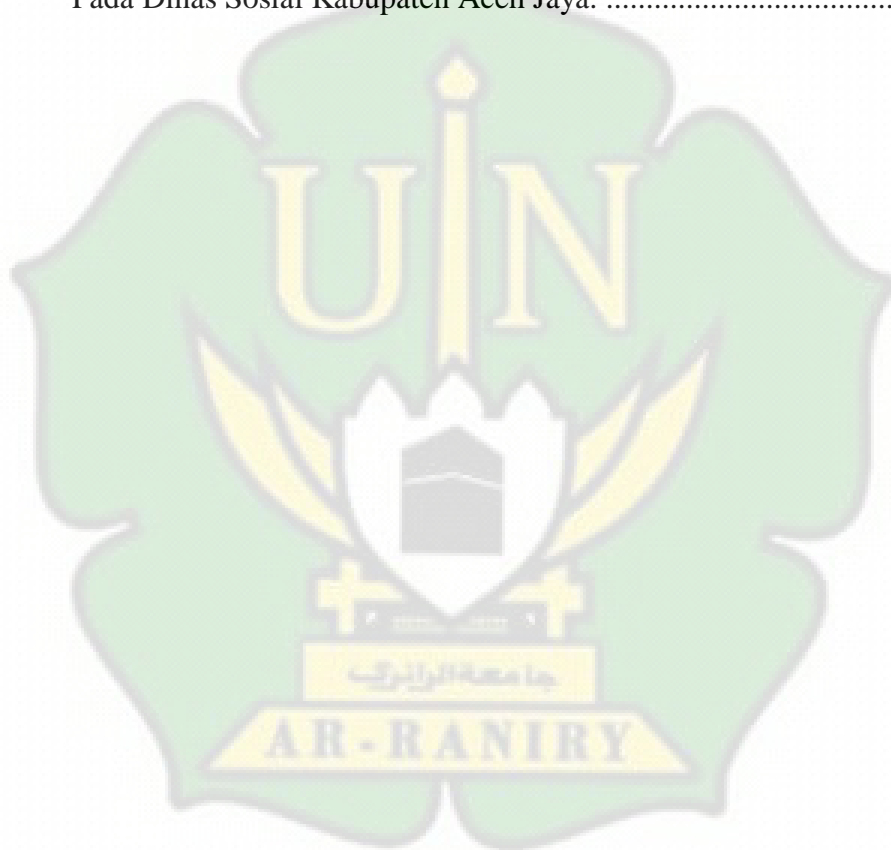
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I 11.1.....	Latar
Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian	10
BAB II	122.1.
Penelitian Terdahulu	12
2.2. Landasan Teori	17
2.1.1. Arah kebijakan sosial dan kebijakan publik	17
2.1.2. Kebijakan dan Penanggulangan Banjir Terpadu.....	21
2.1.3. Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas	23
2.3. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III	333.1.
Pendekatan Penelitian	33
3.2. Fokus Penelitian.....	33
3.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5. Informan Penelitian.....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
BAB IV 394.1.	Hasil
Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran Lokasi Kabupaten Aceh Jaya.....	39
4.1.2 Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	48
4.1.3 Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Tenom oleh Pemerintah Kabupaten	63
4.1.4 Kebijakan Sosial Penanggulangan Banjir di Kecamatan	

Teunom.....	68
4.2. Pembahasan	73
4.2.1. Penanggulangan Banjir di Wilayah Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.....	73
4.2.2. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam penanggulangan banjir di Wilayah Tenom oleh Pemerintah Kabupaten	75
4.2.3. Kebijakan Sosial Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom.....	77
BAB V	795.1.
Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Aceh Tahun 1815-2015.....	2
Tabel 1.2 Potensi Penduduk Terdampak Banjir	5
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian ..	35
Tabel 4.1 Tabel Desa dan jumlah Penduduk di Kecamatan Teunom	41
Tabel 4.2 Tabel Desa yang terdampak banjir di Kecamatan Teunom	42
Tabel 4.3 Daftar Nama-nama Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Bencana Banjir di Provinsi Aceh Tahun 2021	4
Gambar 4.1	Peta Kerentanan Bencana	40
Gambar 4.2	Banjir yang melanda Desa Gampong Baro	43
Gambar 4.3	Banjir yang melanda Desa Pasi Geulima	43
Gambar 4.4	Banjir yang melanda Desa Blang Baro	34
Gambar 4.5	Struktur Organisasi BPBD Aceh Jaya	45
Gambar 4.6	Jalanan sebelum terjadinya banjir	51
Gambar 4.7	Jalanan setelah terjadinya banjir	51
Gambar 4.8	Rumah warga yang terdampak banjir	53
Gambar 4.9	Tanggul batu gajah di desa Panton	55
Gambar 4.10	Tanggul batu gajah di desa Panton	55
Gambar 4.11	Rumah warga dengan pondasi lebih tinggi	58
Gambar 4.12	Brosur himbauan banjir	60
Gambar 4.13	Tagana Masuk Sekolah (TMS) di SMK 1 Teunom	63
Gambar 4.14	Pelatihan dapur lapangan dari TAGANA	67
Gambar 4.15	Jalanan setelah terjadinya banjir	71
Gambar 4.16	Pelatihan dan pengukuhan KSB di desa Rambong Payong kecamatan Teunom	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	84
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	86
Lampiran 3	Surat Permohonan Penelitian.....	87
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak dilanda bencana. Selama periode 2018-2021 bencana di Indonesia semakin meningkat. Baik bencana dalam skala kecil maupun besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir yang terjadi wilayah Indonesia. BNPB pada tahun 2018 membuat kajian mengenai risiko dari bencana banjir untuk tiap provinsi di Indonesia, baik itu risiko bencana sedang dan risiko bencana tinggi. BNPB mencatat kerugian materiil yang timbul akibat bencana hidrometeorologi basah sejak tahun 2018-2022 mencapai Rp. 31,5 triliun.¹

Dalam sepuluh tahun terakhir bencana alam seperti longsor, gempa bumi, maupun banjir bandang masih banyak terjadi di beberapa kawasan yang ada di wilayah Aceh. Dalam rentang tahun 2020-2023 tercatat bencana banjir yang melanda beberapa kawasan menyebabkan masyarakat terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih layak. Sejak lama memang bencana banjir telah terjadi di Aceh dan berdampak luas terhadap masyarakat secara menyeluruh.

¹ Harian Media Indonesia, Tanggal 3 Mei 2023.

Tabel 1.1
Sejarah Kejadian Bencana Di Provinsi Aceh Tahun 1815-2015

Bencana	Jumlah Bencana	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah rusak berat	Rumah rusak ringan	Kerusakan lahan
1. Banjir	215	142	545	65	659.499	3.594	8.741	80.219
2. Banjir Bandang	13	60	38	32	99.724	17.740	23.494	180
3. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	21	2	2	-	567	144	30	-
4. Gempa Bumi	27	245	2.920	-	135.227	12.069	15.422	-
5. Tsunami	30	166.551	1.138	6.220	436.180	323.036	96.609	58.087
6. Kebakaran Hutan dan Lahan	4	-	-	-	800	-	-	344
7. Kekeringan	62	-	-	-	-	-	-	73.622
8. Epidemik dan Wabah Penyakit	3	139	42	-	-	-	-	-
9. Letusan gunung Api	1							
10. Cuaca Ekstrem	50	1	101	1	3.045	641	3.859	86
11. Tanah Longsor	28	20	12	4	11.525	158	1.040	286
Total Kejadian	454	167.160	4.798	6.322	1.346.567	357.382	149.413	212.824

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bencana banjir merupakan bencana yang paling sering muncul dan berdampak luas kepada masyarakat. Tercatat banjir yang melanda Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara hingga ke Bireuen pada awal tahun 2023 menyebabkan 20.901 warganya terpaksa mengungsi. Kondisi yang sama yang juga dialami di Kabupaten Aceh Jaya dimana 3.736 jiwa terpapar banjir sejak dari tahun 2015

sampai saat ini. Wajar bila kemudian Kabupaten Aceh Jaya masuk dalam kawasan intensitas tinggi di saat bencana banjir terjadi.²

Tabel 1.2
Potensi Penduduk Terdampak Banjir

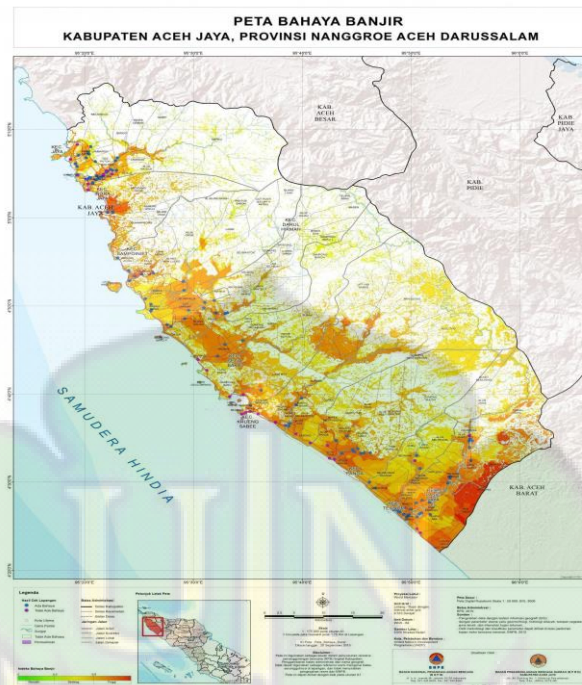
Wilayah	Jumlah Penduduk terpapar (jiwa)	Kelompok rentan (jiwa)			
		Kelompok umur rentan	Penduduk miskin	Penduduk catat	
Kabupaten					
Aceh Jaya	58.502	9.644	12.412	511	Tinggi

Lihat : Sumber: Data dan informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015

Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Teunom Aceh Jaya mewakili kasus-kasus bencana banjir yang terjadi di Aceh. Dalam kurun waktu 2015-2021 terjadi 28 kali banjir akibat luapan sungai Krueng Teunom. Peristiwa banjir ini bukanlah peristiwa baru yang dialami masyarakat sehingga bencana banjir tersebut telah menimbulkan permasalahan di masyarakat sendiri baik terkait penanganan banjir, upaya pembuatan tanggul, maupun rencana relokasi masyarakat ke lokasi yang lebih baik.³

² Lihat, Kajian Risiko Bencana Aceh 2016-2020, BPBA Aceh, Tahun 2015.

³ Harian Serambi Indonesia, Juni 2019.



Gambar 1.1 Peta Bencana Banjir di Provinsi Aceh Tahun 2021

Sumber : Data Arsip BPBK Aceh Jaya

Selama musim penghujan seperti pada bulan Januari sampai Februari, semua pihak biasanya khawatir datangnya bencana banjir. Curah hujan di bulan tersebut biasanya lebih tinggi dari bulan lainnya sebagaimana hasil pengamatan dari BMKG pada tahun 2013. Secara topografis Kecamatan Teunom masuk dalam kawasan rawan banjir dan intensitas hujan yang tinggi serta alih fungsi lahan masih menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Masyarakat Teunom yang bertempat tinggalnya di daerah dataran rendah sering mengalami bencana banjir, apalagi jika tempat tinggalnya berada dekat kondisi banjir. Kajian-kajian sebelumnya banyak yang mencermati persoalan banjir yang terjadi di Kecamatan Teunom lebih dicermati dari daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rendah. Disisi lain kerusakan DAS diakibatkan oleh penambahan penduduk

maupun pengembangan kawasan ekonomi serta kurangnya keterpaduan sektor hulu dan hilir dalam pemanfaatan DAS di Kecamatan Teunom.

Saat ini pemerintah daerah lebih fokus pada penanggulangan banjir dalam skala jangka pendek seperti pembuatan tanggul, rehabilitas ekonomi masyarakat korban banjir, pembagian perahu dan makanan serta bantuan kepada penduduk di saat banjir terjadi. Tindakan ini dilakukan sebagai bantuan awal untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir. Namun, dari aspek penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih terfokus pada aspek bantuan sosial, belum mampu menjadi kebijakan yang terintegrasi dalam penanganan banjir yang sering terjadi di kawasan Teunom. Wajar bila kemudian, penanganan banjir yang dilakukan pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum komprehensif sebagai dengan kebutuhan masyarakat.⁴

Dalam manajemen risiko bencana berbasis masyarakat ini, komunitas dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan yang sama, terpapar dengan risiko bahaya yang sama, atau sama-sama telah terkena dampak dari suatu bencana. Komunitas juga mempunyai masalah dan kekhawatiran serta harapan yang sama tentang risiko bencana. Komunitas yang terlibat yaitu aparat gampong dan masyarakat setempat, mereka terlibat dalam menangani banjir seperti penanganan sebelum dan pasca banjir.⁵

Selama musim hujan seperti bulan September sampai dengan bulan November, Semua pihak pemerintah dan juga masyarakat biasanya khawatir akan

⁴ Muhammad Febriansyah, Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan, Jurnal Share Social Work, Vol. 1, Maret 2019.

⁵ Nasdian, Fredian Tonny.. Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2004

datangnya bencana banjir. Curah hujan pada periode tersebut umumnya lebih besar dari bulan lainnya.⁶ Oleh sebab itu, warga yang bertempat tinggal di kawasan rawan banjir (bantaran sungai, dataran banjir, tepi laut, dan lain-lain) ataupun yang teratur menghadapi banjir, umumnya telah siap dengan kemungkinan terburuk menghadapi banjir. Terlebih apabila jika tempat tinggalnya dekat badan perairan seperti sungai. Hujan yang turun di sebagian besar wilayah Teunom Kabupaten Aceh jaya menimbulkan musibah banjir di banyak tempat seperti di desa Pasi Geulima, Pasi Timon, Gampong Baro, Blang Baro, Keude Teunom dan beberapa desa lainnya. Ada pun pihak komunitas yang terlibat dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir untuk menanggulangi banjir antara lain: Damkar, TNI, Polri, PMI, RAPI, Satgas SAR, Pihak Masyarakat atau Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Kampung Siaga Bencana (KSB), dan unsur relawan lainnya.⁷

Dalam Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa, BPBK Aceh Jaya mempunyai peran dan tugasnya sangat penting dalam struktur organisasi daerah sebagai salah satu badan yang menangani masalah kebencanaan.

Keterlibatan Masyarakat, TAGANA, KSB, Dinas Sosial, BPBK Aceh Jaya menjadi sangat penting dalam upaya penanganan banjir yang sering terjadi di Kecamatan Teunom. Mengingat keterlibatan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Teunom sangat berdampak nyata bagi

⁶ Aprilia Findayan, Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang, Jurnal Geografi, Vol.12, 2015.

⁷ Antaranews.com. tanggal 25 Oktober 2019.

masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan banjir secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Petugas TAGANA Terhadap Kesiapan Bencana, yang memiliki tugas meliputi pra, saat bencana dan pasca bencana.⁸

Pembentukan TAGANA merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi, dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Keterlibatan masyarakat dan komunitas yang ada selama ini sangat penting untuk meminimalisir dampak banjir di kawasan daerah rawan banjir. Pelibatan ini juga menuntut kemudian gampong atau desa yang disebutkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) merupakan desa yang mempunyai kemampuan mandiri dalam beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Yaitu dengan tau tanda tanda akan adanya bencana yaitu seperti tanda dari warna langit yang menghitam di sisi utara, hal tersebut menandakan banjir kiriman akan segera datang, dengan begitu masyarakat bisa mulai bersiap-siaga.

TAGANA memiliki fungsi, diantaranya: (1) Melakukan pendataan dan penetapan daerah rawan bencana; (2) Meningkatkan kapasitas masyarakat

⁸ Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Petugas TAGANA Terhadap Kesiapan Bencana.

melakukan penyuluhan risiko bencana; (3) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; (4) Melakukan deteksi dini.

Kekuatan komunitas yang ada di masyarakat sebagai bentuk peningkatan kapasitas berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat dalam penanggulangan banjir berbasis komunitas. Konsekuensi ini berdampak luas dari berbagai program penanganan banjir yang dilakukan di kawasan daerah rawan banjir, termasuk kawasan teunom. Artinya, keterlibatan komunitas yang ada di masyarakat sangat penting dalam penanggulangan banjir yang kerap terjadi selama ini. Terlebih kajian tentang kebijakan sosial berbasis komunitas dalam Penanggulangan banjir masih jarang dilakukan secara intens dalam upaya melihat relasi kebijakan pemerintah dengan basis komunitas dalam lingkup Penanggulangan bencana banjir secara terpadu.

Kebijakan sosial seperti apa yang dilakukan pemerintah daerah dan bagaimana kebijakan tersebut memberi manfaat secara komprehensif dalam penanganan banjir yang selama ini dilakukan belum terintegrasi secara baik, baik secara struktural maupun kultural. Realita tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir dalam konteks *social policy* yang berbasis masyarakat menarik untuk dicermati lebih jauh. Oleh karena itu penelitian mengambil judul “Kebijakan Sosial Penanggulangan Banjir Berbasis Komunitas Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah:

1. Penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum dilakukan secara maksimal.
2. Mekanisme Pengurangan Resiko Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam penanganan banjir di Wilayah Tenom belum terkoordinasi secara baik dan maksimal.
3. Kebijakan sosial Penanggulangan banjir berbasis komunitas belum dilakukan secara komprehensif sehingga penanganan bencana banjir dilakukan parsial dan belum koordinasi dengan instansi terkait.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan beberapa masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam Penanggulangan banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana Kebijakan Sosial Penanggulangan banjir berbasis komunitas di Kecamatan Teunom?

1.4. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah daerah di Kecamatan Teunom.
2. Untuk mengatasi pengurangan resiko bencana di Kecamatan Teunom.
3. Untuk mengetahui kebijakan sosial Penanggulangan banjir berbasis komunitas.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Instansi

Sebagai pedoman dan saran serta masukan untuk penerapan yang bisa dipertimbangkan bagi pihak instansi yang terkait dalam penelitian ini dalam konteks Penanggulangan bencana banjir secara berkelanjutan.

2. Akademisi

Untuk memperluas wawasan keilmuan terkait bencana dan pengetahuan dalam bidang perkembangan teknologi kebencanaan terkhusus pada sistem Penanganan Banjir Berbasis Komunitas.

3. Masyarakat

Sebagai referensi yang dapat memberikan kontribusi keterlibatan masyarakat untuk peduli dengan alam dan lingkungan sekitar secara nyata dan terpadu.

4. Mahasiswa

Sebagai masukan dan panduan yang dapat memberikan keterlibatan dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Kebijakan Sosial Banjir Berbasis Komunitas. dan sebagai referensi bagi penelitian yang lain sebagai bahan penelitian kedepannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Aspek penanggulangan banjir dalam dampak dari bencana banjir terhadap masyarakat telah ramai dikaji baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Kajian ini semakin berkembang di tengah upaya penataan wilayah dan pemukiman penduduk di saat bencana berkembang di masyarakat. Fokus kajian tidak hanya pada aspek pengelolaan banjir namun juga mencermati berbagai persoalan banjir dari aspek sosial, budaya maupun ekonomi.

Arief Rosyid (2013), melalui tulisannya memberi gambaran bagaimana bencana banjir di cermati dari berbagai aspek, salah satunya tata kelola Lahan dan ruang. Pemanfaatan lahan secara maksimal dengan menggunakan prinsip ekosistem lingkungan yang menempatkan tata perencanaan ruang dan pemukiman menjadi penting untuk melihat penanganan banjir secara terpadu. Sehingga bencana banjir dapat dicermati secara tematik dan praktis untuk dikelola yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada tata guna wilayah dan ruang.

Aprilia (2015)⁹ dalam tulisannya yang berjudul “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang” yang mencoba melihat mekanisme pengelolaan dan kesiapan masyarakat di saat banjir terjadi. Studi ini menggambarkan bagaimana kesiapan dinas terkait dalam penanggulangan banjir

⁹ Aprilia Findayan, Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang, Jurnal Geografi, Vol.12, 2015

dan juga keterlibatan masyarakat dalam menghadapi banjir yang setiap tahun terjadi di kawasan Semarang. Mekanisme penanganannya tidak hanya dilakukan secara berkala namun juga secara berkesinambungan untuk mengembangkan pemahaman secara dini kepada masyarakat terkait bencana banjir.

Anwar Musyadad (2015)¹⁰ melalui skripsinya yang berjudul menjelaskan bagaimana peran lembaga BPBD Kabupaten Lebak dalam penanggulangan banjir. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mencermati keterlibatan BPBD wilayah Lebak dalam upaya penanggulangan banjir yang kerap terjadi di wilayah Lebak. Mapping yang terfokus pada kebijakan lembaga dan manajemen kelembagaan BPBD menjadi lokus yang digunakan penulis dalam melihat peran BPBD Kabupaten Lebak terkait banjir. Indikator kuantitatif yang melihat kinerja BPBD Lebak menjadi acuan untuk memperjelas bagaimana kinerja secara kelembagaan BPBD dalam penanggulangan banjir.

Nasyiruddin dkk pada tahun 2015 meneliti mengenai *Strategi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana. Dan penghijauan yang dilakukan yaitu sebagai alat resapan air dari daerah pegunungan untuk mengurangi banyaknya aliran debit air ke daerah hilir. Pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti

¹⁰ Anwar Musyadad, Kinerja BPBD Kabupaten Lebak Dalam Penanggulangan Bencana Banjir, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

pembuatan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai, peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.¹¹

Rismawati dkk pada tahun 2015 meneliti mengenai *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Manggala kota Makassar*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik, yaitu dengan melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan banjir seperti menetapkan kebijakan, bekerjasama serta berkoordinasi dengan dinas dan instansi yang terkait, serta memberikan fasilitas akibat dampak banjir yang terjadi di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Priangga dkk pada Tahun 2017 meneliti mengenai *Strategi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki sejumlah daerah yang berpotensi dapat terjadinya bencana alam hal ini diperoleh dari hasil penelusuran pemerintah daerah setempat serta BPBD Kabupaten Pesawaran saat peninjauan di lapangan serta laporan dari setiap kecamatan ; Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan sesuai dengan kondisi daerah masing masing ; rehabilitasi merupakan tindakan yang diambil setelah bencana oleh pemerintah

¹¹ Nasyiruddin dkk, *Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*, Jurnal Ilmu administrasi, Vol. V No. 2 (oktober 2015)

Kabupaten Pesawaran melalui BPBD, dalam fase ini BPBD akan membagikan bantuan baik berupa makanan, pakaian dan juga dapat berupa obat-obatan serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya terkena dampak dari bencana tersebut.

Imba pada tahun 2018 meneliti mengenai *Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam menanggulangi Abrasi pantai Di Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar adalah melakukan kegiatan pembangunan penahan dan pemecah gelombang di beberapa titik yang terlalu parah terkena abrasi di Desa Bontomarannu yang memiliki kawasan pesisir, selain itu upaya rehabilitasi secara alami juga berhasil dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat peduli lingkungan pesisir untuk ikut serta melakukan kegiatan tersebut. Hasil penelitian lainnya yaitu lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir dan membuat pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Takalar tidak berjalan dengan lancar, hingga sampai saat ini upaya meningkatkan koordinasi antar sektor juga belum bisa dicapai.

Rizma Andini, pada tahun 2020 meneliti mengenai *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Kota Banda Aceh*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan bencana Daerah Banda Aceh dalam menanggulangi bencana

banjir di Kota Banda Aceh merespon dengan baik, karena berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan masyarakat yang menjadi korban maupun tokoh masyarakat seputar Kota Banda Aceh dari warga yang menjadi korban itu sendiri menyatakan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan dengan baik, program-program yang dilakukan sebelum terjadi bencana dan juga setelah bencana itu selesai benar-benar tepat sasaran. Kerja sama antar staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dan Masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir juga dirasakan terjalin dengan begitu baik.

Tanauma, dkk pada tahun 2021 meneliti mengenai *Strategi Mitigasi Bencana Tsunami Di Desa Kema satu Kabupaten Minahasa Utara*. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan program kemitraan masyarakat dalam bentuk sosialisasi strategi mitigasi tsunami di Desa Kema Satu Kabupaten Minahasa Utara memiliki dampak positif kepada masyarakat mitra yang mengikuti kegiatan tersebut dimana masyarakat semakin memahami bagaimana tsunami terjadi dan memiliki pengetahuan yang semakin memadai terkait strategi pengurangan resiko ketika terjadinya bencana tsunami.

Thiffaly Awwalyca Yumna, pada tahun 2022 meneliti, mengenai *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Dalam Mitigasi Bencana Gelombang Pasang*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana

gelombang pasang, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mitigasi bencana gelombang pasang yaitu penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana, perlindungan masyarakat, serta pengurangan resiko bencana dengan program-program pembangunan.

Menarik dari beberapa kajian sebelumnya, lokus kajian ini lebih difokuskan pada kebijakan Penanggulangan banjir berbasis komunitas yang tidak hanya melibatkan masyarakat lokal namun juga terkoordinasi dengan lintas sektor dalam penanganan banjir. Studi ini mencoba mencermati penekanan pada kebijakan sosial Penanggulangan banjir berbasis komunitas belum banyak yang dicermati secara komprehensif yang belum dikaji secara mendalam dari beberapa penelitian sebelumnya. Artinya, prinsip penanganan banjir tidak hanya dilakukan secara top down namun juga harus secara *bottom up* yang bermula dari kebutuhan masyarakat setempat yang terkena banjir.

Fokus kajian yang dilakukan di wilayah Teunom menjadi alternatif untuk mencermati kebijakan sosial Penanggulangan banjir secara terpadu yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat secara terpadu menangani banjir yang kerap terjadi di masyarakat Teunom Aceh Jaya.

2.2. Landasan Teori

2.1.1. Arah kebijakan sosial dan kebijakan publik

Kebijakan sosial merupakan bentuk dari kebijakan publik dan kebijakan sosial yang merupakan peraturan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu serta mengatasi biaya sosial, pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial yang

berkenaan tentang publik, yakni mengatasi masalah dalam bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith : *In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's lives by providing a range of income support, community services and support programs.*¹² Artinya, kebijakan sosial merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian berbagai tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.¹³

Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur masyarakat, lembaga-lembaga publik agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

2. Program pelayanan sosial.

Kebijakan ini diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial dalam bentuk bantuan barang, tunjangan uang, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, Advokasi, Pendampingan).

3. Sistem perpajakan.

¹² Judith Bessant, Rob Watts, Tony Dalton, Paul Smyth (2006): *Talking Policy*, London, Routledge

¹³ Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press

Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial kedalam dua aspek. *Pertama*, kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. *Kedua*, kebijakan sosial. dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.¹⁴ Melihat pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zastrow yang mengemukakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan dan rekreasi pada setiap individu di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari kebijakan sosial disusun program program pelayanan sosial kepada masyarakat.¹⁵

Lebih lanjut, kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat dilihat dari program-program pelayanan sosial dalam bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesehatan, pelayanan sosial di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan serta layanan sosial personal. Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai

¹⁴ Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), "Introduction: Social Policy and Social Welfare" dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage, halaman xi-xv

¹⁵ Charles Zastrow *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* Cengage Learning, 2009

kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dikategorikan menjadi *public assistance*, *social insurance*, *social service*, serta isu-isu yang mempengaruhi pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial.

Terkait dengan kebijakan sosial, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam mengkaji kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Pada umumnya kajian terhadap kebijakan sosial dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan atau perbaikan terhadap kondisi kehidupan klien atau kelompok sasaran program. Dengan kata lain, penelitian yang terkait dengan kebijakan sosial tersebut lebih diarahkan pada implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan sosial. Penelitian mengenai evaluasi kebijakan dilakukan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

Kebijakan sosial tersebut merujuk pada tindakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya melalui penyediaan layanan dan pendapatan. Pada umumnya, kebijakan sosial dibatasi pada kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan pendapatan, layanan, dan kesempatan bagi mereka yang lanjut usia, miskin, disable, sakit, atau kelompok rentan lainnya. Kebijakan sosial itu lebih luas yang dapat dikategorikan menjadi *public assistance* (karena hanya untuk orang miskin), *social insurance* (karena untuk mencegah orang menjadi miskin), *social service* (karena untuk menyediakan layanan, pendidikan, dan lainnya), serta isu-isu yang mempengaruhi pemenuhan pelayanan

kesejahteraan sosial.¹⁶

2.1.2. Kebijakan dan Penanggulangan Banjir Terpadu

Penanggulangan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Penanggulangan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi penanggulangan dapat pula disebut sebagai kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial

Untuk memahami interpretasi pada kebijakan tersebut dapat dilihat dari pandangan Jamrozik mengenai level dalam kebijakan sosial. Jamrozik (2001: 51-52) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan suatu rangkaian proses, yang meliputi tiga level, yaitu level politik (*political sphere*), level administratif (*administrative sphere*), dan level operasional (*operational sphere*). Level politik merupakan proses perencanaan dan formulasi kebijakan (*policy planning and formulation*). Level administratif merupakan proses interpretasi dan penyusunan kebijakan menjadi serangkaian kegiatan yang lebih operasional.¹⁷

Secara umum, masalah bencana di Indonesia, khususnya di wilayah Teunom Kabupaten Aceh Jaya terkait bencana banjir cukup rumit karena kejadian mereka di daerah terpencil dan tidak dapat menemukan orang yang rentan, yang terletak jauh dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, paradigma baru untuk

¹⁶Suharto, Edi (2005), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta

¹⁷ Muhammad Febriansyah, Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan, Jurnal Social Work, Volume 6. Mei, 2019.

penanggulangan bencana harus dapat mengatasi masalah tersebut, terhadap manajemen bencana berbasis masyarakat, yang adalah orang-orang / masyarakat yang mandiri, mampu mengenali bahaya di lingkungan, dan mampu membantu diri mereka sendiri selama waktu kritis sebuah bencana.

Mengingat banjir sudah terjadi secara rutin, makin meluas, kerugian makin besar, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampaknya, yang dapat dilakukan secara struktural maupun non structural. Upaya non-struktural merupakan upaya penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia supaya harmonis dan serasi dengan lingkungan. Contoh upaya non-struktural adalah pengaturan maupun pengendalian penggunaan lahan atau tata ruang, menjaga daerah aliran sungai, Serta penegakan peraturan/hukum, pengawasan penyuluhan kepada masyarakat, dan lain-lain.

Selain upaya tersebut, upaya pengendalian banjir dan dampaknya dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama yaitu memindahkan penduduk yang biasa atau akan terkena banjir, memindahkan banjirnya, mengkondisikan penduduk hidup bersama dengan banjir, Dari 3 pendekatan tersebut yang sering dilakukan adalah mengendalikan banjirnya dan membiasakan penduduk hidup bersama banjir.

Akibat dari kurang terurusnya Daerah Aliran Sungai (DAS) maka tingkat infiltrasi di kawasan tersebut menurun sedangkan kecepatan dan debit aliran permukaannya meningkat. Ketika turun hujan lebat dalam waktu yang lama, maka sebagian besar air hujan akan mengalir diatas permukaan tanah dengan kecepatan dan volume yang besar dan selanjutnya terakumulasi menjadi banjir. Banyak

kawasan atau jalan-jalan di Aceh Jaya yang tergenang air dan menghambat lalu lintas di tengah kota.

Berbagai upaya tersebut telah banyak dilakukan seperti persoalan banjir yang terjadi di kawasan Teunom lebih dicermati dari daya dukung DAS (Daerah Aliran Sungai) yang rendah. Disisi lain kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan sumber daya alam akibat penambahan penduduk maupun pengembangan kawasan ekonomi serta kurangnya keterpaduan sektor hulu dan hilir dalam pemanfaatan DAS di kawasan Teunom, mengingat salah satu sungai di aceh jaya terhubung dengan sungai yang ada di pidie jaya menjadi penyebab utama banjir yang terjadi di Aceh Jaya. Namun hasilnya belum seperti yang diharapkan, banjir masih terus terjadi dengan korban dan kerugian yang tidak sedikit.¹⁸

2.1.3. Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas

Mitigasi disebutkan dengan bagian dari pencegahan bencana dengan melakukan upaya untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat dari bencana, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang diambil yaitu menganalisis dan mengurangi risiko bencana yang ada. Dalam literatur yang lain disebutkan mitigasi mengandung makna, upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda". Dari pengertian ini, mitigasi bencana merupakan upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi suatu bencana guna untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana

¹⁸ Arief Rosyid, Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vo. 2. Desember 2013.

tersebut.¹⁹

Menurut LIPI UNESCO-ISDR menyatakan bahwa ada 5 faktor-kritis untuk mengantisipasi bencana yang menjadi parameter kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu²⁰:

1. Pengetahuan dan Sikap Terhadap Risiko

Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengalaman bencana tsunami dan banjir di Aceh, Nias, Yogyakarta serta berbagai bencana yang terjadi di berbagai daerah lainnya memberikan pelajaran yang sangat berarti akan pentingnya pengetahuan tentang bencana alam.

Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana alam

2. Kebijakan dan Panduan

Kebijakan kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan yang signifikan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi: pendidikan publik, emergency planning, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, SDM dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana

¹⁹ Rudy Pramono, (2016), Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 18 No. 1.

²⁰ Diah Ayu Ratna Handayani, (2022), Strategi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Merapi, *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 6, No. 1, November.

3. Rencana Tanggap Darurat

Rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan.

4. Sistem Peringatan Bencana

Sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Dengan peringatan bencana ini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan

Konsep mitigasi menurut (Coburn dkk, 1994).

- 1) Tahap pertama yang penting dalam setiap strategi mitigasi adalah memahami sifat bahaya-bahaya yang mungkin akan dihadapi.
- 2) Daftar dan urutan bahaya-bahaya sesuai dengan kepentingan untuk setiap negara dan daerah, bahkan bahaya bencana bisa bervariasi dari desa ke desa. Kajian-kajian dan pemetaan bisa membantu mengidentifikasi bahaya-bahaya yang paling signifikan di setiap area.
- 3) Mitigasi tidak hanya menyelamatkan hidup dan yang terluka dan mengurangi kerugian harta benda, akan tetapi juga mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang saling merugikan dari bahaya-bahaya alam terhadap aktivitas ekonomi dan sosial.
- 4) Jika sumber-sumber mitigasi terbatas, maka harus ditargetkan pada yang paling efektif untuk elemen-elemen yang paling rentan dan

mendukung tingkat aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada.

- 5) Penilaian kerentanan merupakan aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif. Kerentanan secara tidak langsung menyatakan kerawanan terhadap kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi dan kurangnya sumber daya untuk pemulihan yang cepat.

Untuk mengurangi kerentanan fisik elemen-elemen yang lemah bisa dilindungi atau diperkuat. Untuk mengurangi kerentanan institusi-institusi sosial dan aktivitas-aktivitas ekonomi, infrastruktur perlu dimodifikasi atau diperkuat atau pengaturan-pengaturan institusi dimodifikasi. Aspek mitigasi bencana Kejadian bencana tak luput dari kajian kebijakan publik karena menyangkut tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan (*do or not to do*) oleh pemerintah. Hal ini Pasal 1 (9) UU 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana didefinisikan sebagai “Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Artinya mitigasi bencana dapat dilakukan melalui aspek struktural dan non struktural. Aspek struktural meliputi pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya meminimalkan bencana. Sedangkan aspek non struktural meliputi peningkatan *capacity building* masyarakat, maupun perencanaan mitigasi bencana secara lanjut.²¹

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 33 Tahun 2006 yang berkaitan dengan mitigasi bencana diantaranya :

²¹ Burhanudin Mukhamad Faturahman, Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik, *Jurnal PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.

- a. Setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- b. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
- c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
- d. Penggalan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

Pentingnya unsur masyarakat dalam penanggulangan bencana tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (3). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat, dan lembaga usaha. Sebagai upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh (komprehensif), masyarakat telah dijadikan sebagai salah satu unsur terpenting.

Pada dasarnya bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata atas segala bencana yang muncul. Menurut Stallings (1991), dampak bencana yang dialami berbeda-beda menurut kelas-kelas sosial. Seringkali masyarakat gagal melihat isu-isu yang ada sebelum peristiwa terjadi. Masyarakat harus secara kritis mengenali sifat bencana, kemudian bertindak sesuai dengan sistem sosial ketika risiko ditempatkan dalam hubungannya satu dengan yang lain, lingkungan

mereka, hubungan timbal balik yang dapat dipahami sebagai kerentanan individu, rumah tangga, komunitas atau masyarakat.²²

Komunitas merupakan entitas yang secara mandiri sudah memiliki sistem operasional mereka. Menurut Montagu dan Matson, terdapat sembilan konsep komunitas yang baik dan empat kompetensi masyarakat, yakni: Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok b) Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara bertanggungjawab c) Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri d) Pemerataan distribusi kekuasaan e) Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama f) Komunitas memberi makna pada anggota g) Adanya heterogenitas dan beda pendapat h) Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan i) Adanya konflik dan *managing conflict*.²³

Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Di samping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.

²² Rudy Pramono, (2016), Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 18 No. 1.

²³ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987, hal. 69.

Komunitas merupakan sebuah istilah yang digunakan secara luas. Satu konsep umum mengenai komunitas adalah bahwa suatu komunitas adalah harmonis, mempunyai satu keselarasan minat dan aspirasi, dan terikat oleh nilai-nilai dan tujuan yang sama. Definisi ini menunjukkan bahwa komunitas bersifat homogen. Dalam kenyataannya, suatu komunitas dapat dibedakan secara sosial dan beragam. Gender, kelas, kasta, kekayaan, usia, etnis, agama, bahasa, dan aspek-aspek lain membedakan dan saling melengkapi dalam komunitas. Kepercayaan, minat, dan nilai-nilai anggota komunitas dapat bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, sebuah komunitas tidak perlu homogen.²⁴

Dalam manajemen risiko bencana berbasis masyarakat ini, sebuah komunitas dapat diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai satu atau dua kesamaan seperti misalnya tinggal di lingkungan yang sama, terpapar ke resiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena dampak suatu bencana. Komunitas juga dapat mempunyai masalah, kekhawatiran dan harapan yang sama tentang resiko bencana. Komunitas yang terlibat yaitu aparat gampong dan masyarakat setempat, mereka terlibat dalam menangani banjir seperti penanganan sebelum dan pasca banjir.

Peran komunitas dalam proses pembangunan adalah penting karena dalam kenyataannya tidak seorang pun yang dapat memahami kesempatan dan hambatan di tingkat lokal selain komunitas setempat itu sendiri, dan tidak seorang pun lebih tertarik untuk memahami urusan setempat selain komunitas yang keberlanjutan hidup dan kesejahteraannya dipertaruhkan. Oleh karena komunitas tempatan harus

²⁴ Nasdian, Fredian Tonny.. Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, 2004

dilibatkan dalam identifikasi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kerentanan terhadap bencana dan informasi harus diperoleh dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh komunitas. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebanyakan pengelolaan resiko bencana dan program pengelolaan yang bersifat top-down belum mampu mencakup kebutuhan setempat khusus dari komunitas yang rentan, mengabaikan potensi sumber daya dan kapasitas setempat, dan mungkin dalam beberapa kasus bahkan meningkatkan ketergantungan sekaligus kerentanan komunitas.²⁵

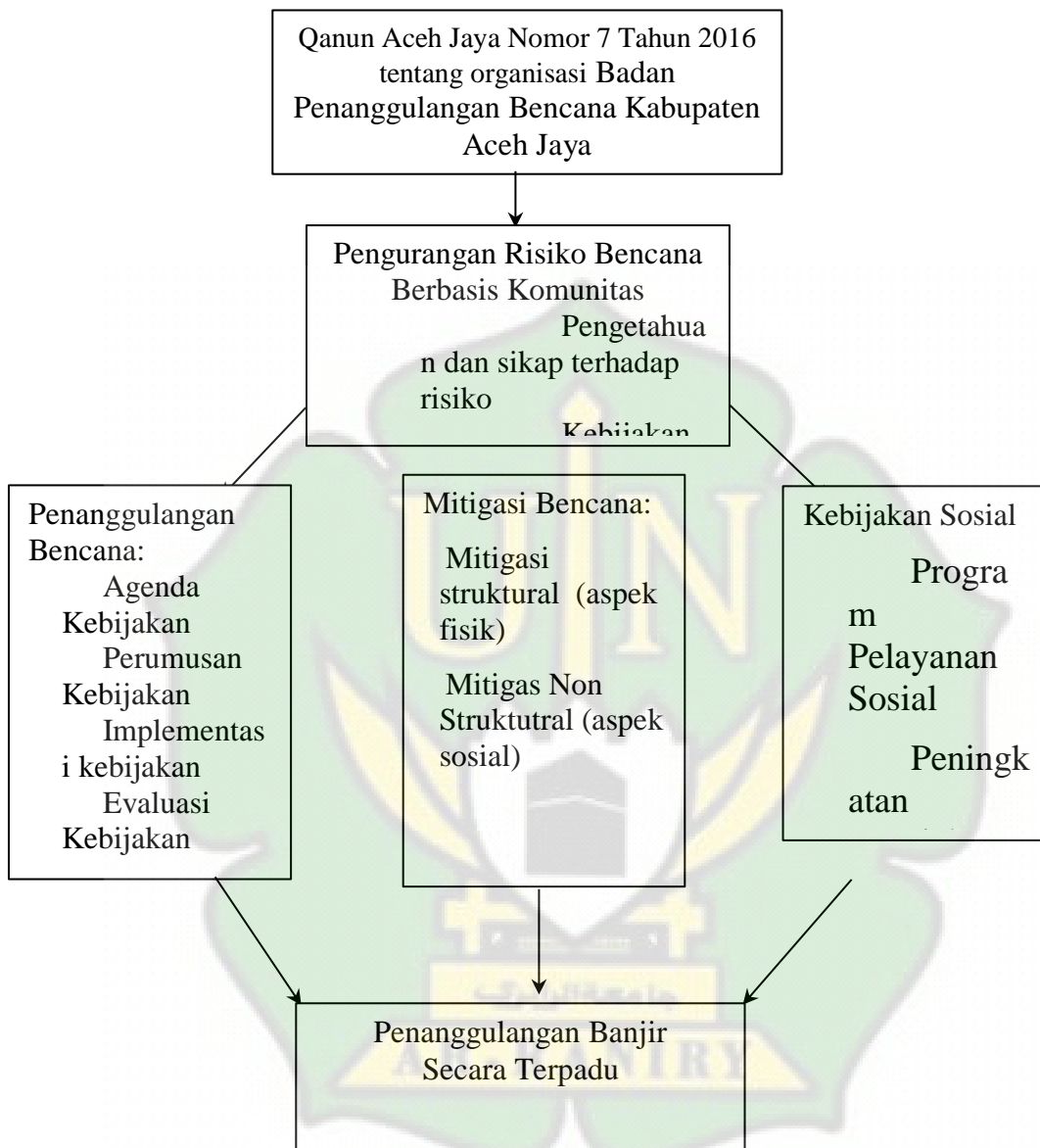
Tujuan penanggulangan risiko bencana oleh komunitas adalah mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi resiko bencana yang mereka hadapi. Keterlibatan langsung komunitas dalam melaksanakan tindakan-tindakan peredaman risiko di tingkat lokal adalah suatu keharusan. Beberapa penulis membedakan antara keikutsertaan komunitas dengan keterlibatan komunitas. Keikutsertaan dan keterlibatan komunitas digunakan secara bergantian, yang berarti bahwa komunitas bertanggung jawab untuk semua tahapan program termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Pada akhirnya, ujung dari partisipasi komunitas dalam penanggulangan bencana adalah penanggulangan bencana oleh komunitas itu sendiri. Upaya pengurangan risiko bencana ini tidak hanya mendorong pemerintah, melainkan juga perlu untuk dapat menggerakkan individu, keluarga, komunitas yang melingkup seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam menghadapi bencana secara berkelanjutan. Ketika terjadi bencana pihak BPBK melakukan koordinasi dengan TNI, Polri,

²⁵ Eko Teguh Paripurno, Panduan Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas, MPBI, Jakarta, 2014.

Dinas Social, TAGANA, PMI, dan unsur forum komunikasi pihak kecamatan yang terdiri dari Kecamatan, Koramil dan Kapolsek untuk membicarakan proses dan tahapan serta langkah langkah penanganan bencana. dan juga berkoordinasi mengenai pemberian bantuan baik untuk korban yang terdampak. Dan dari masyarakat membuat dapur umum di tempat pengungsian, membuka saluran pembuangan air luapan banjir ke laut.

Masyarakat Teunom terbiasa hidup bersama ancaman banjir yang selalu terjadi setiap tahun. Oleh karenanya, masyarakat yang merupakan salah satu bentuk komunitas ini memiliki pengetahuan yang telah diajarkan secara turun-temurun antar generasi untuk memperkirakan waktu terjadinya banjir dan upaya-upaya kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak banjir. Sebelum banjir masyarakat memperkirakan terjadinya banjir dengan cara melihat tanda-tanda di lingkungan sekitar dalam dua hingga tiga minggu sebelumnya. Apabila terdapat telur keong mulai banyak menempel pada dinding rumah dan awan hitam mulai terlihat dari arah utara serta hujan mulai terjadi rutin setiap hari, maka masyarakat segera bersiap-siap untuk menghadapi banjir tersebut. Mereka juga memiliki pengetahuan lokal untuk mengurangi dampak dari banjir ini. Setelah mereka melihat tanda-tanda tersebut, mereka segera meletakkan barang-barang berharga di tempat tempat tinggi. Pengetahuan dan keahlian dalam pengurangan risiko bencana ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan telah menjadi pengetahuan lokal. Oleh karena itu, komunikasi risiko dari tua ke muda dan juga sebaliknya merupakan hal penting untuk menjaga kearifan lokal yang sudah ada.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berupa penelitian lapangan. Dimana tujuannya memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya kebijakan sosial penanganan banjir berbasis komunitas di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif yaitu memahami gejala atau fenomena yang terjadi di lingkungan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan penjelasan yang merupakan gambaran yang jelas tentang fenomena maupun gejala sosial tersebut. Kemudian, dari fenomena tersebut peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.²⁶

3.2. Fokus Penelitian

Sugiono menyatakan dalam penelitian kualitatif untuk melakukan penentuan dari fokus penelitian harus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi keadaan sosial bermasyarakat dan juga lapangan. bisa dikatakan sebagai fokus penelitian jika salah satu faktor dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan

²⁶ Metha Jaya. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Yogyakarta: (2020). Quadrat. Hal. 110

sosial dalam penanggulangan banjir berbasis komunitas.

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Penanggulangan Bencana	1. Agenda Kebijakan 2. Perumusan Kebijakan 3. Implementasi kebijakan 4. Evaluasi Kebijakan	Burhanudin Mukhamad Faturahman (2018)
2	Mitigasi Bencana	1. Mitigasi struktural (aspek fisik) 2. Mitigasi Non Struktural (aspek sosial)	UU 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
3	Kebijakan Sosial	1. Program Pelayanan Sosial 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Charles Zasrow, Introduction to social work and social warfare (2009)

3.3. Lokasi Penelitian

Penulis menetapkan lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian ini akan dilakukan. maka lokasi penelitian yang dipilih terletak di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, dimana daerah tersebut merupakan kawasan rawan bencana banjir. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran serta informasi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian observasi.

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari key informan, serta pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian yang menjadi pihak yang memberikan informasi yang diperlukan terkait permasalahan penelitian

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Camat Kecamatan Teunom	1 Orang	Pembuat Kebijakan
2	Dinas Sosial	1 Orang	Pembuat Kebijakan
3	Keuchik	3 Orang	Pemerhati Kebijakan
4	BPBK Aceh Jaya	3 Orang	Pembuat Kebijakan
5	Tokoh Masyarakat (Tuha Peut)	1 Orang	Pemerhati Kebijakan
6	TAGANA	1 Orang	Pemerhati Kebijakan
7	Masyarakat Sekitar	3 orang	Korban Banjir
Jumlah		13 Orang	

Alasan mengapa peneliti memilih subjek informan tersebut karena berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti menjadikan informan sebagai orang yang lebih mengetahui masalah yang akan diteliti dan merupakan korban yang

berdampak langsung dengan kejadian bencana banjir tersebut. Maka peneliti memilih Camat Kecamatan Teunom, Dinas Sosial Aceh Jaya, BPBK Aceh Jaya, Kechik daerah setempat, TAGANA, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya informan tersebut peneliti mengharapkan dapat mempermudah mendapatkan segala informasi mengenai penanggulangan banjir di Aceh Jaya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran penelitian yang dilakukan, Sangat penting menggunakan metode pengumpulan data yang baik. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang baik. Dalam rangka memperoleh data lapangan yang relevan, maka teknik pengumpulan data lapangan, meliputi:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami fenomena yang berkembang di masyarakat dengan melakukan pencatatan, merekam dan memotret atas realitas yang ada di dalam masyarakat. Tujuan observasi untuk memahami keadaan alamiah dari objek penelitian, guna memperoleh gambaran yang jelas berdasarkan situasi yang ada di masyarakat. Pelaksanaan pengamatan dilakukan sekaligus pada saat proses kegiatan wawancara berlangsung untuk mengukur validitas informasi yang disampaikan dengan melihat kondisi alamiah yang ada di saat proses wawancara.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informal penelitian yang dilakukan secara langsung yang terfokus pada tema penelitian. Wawancara dilakukan dengan melibatkan informal dari pihak kecamatan, BNPB setempat, Dinas PU dan Tata Ruang serta masyarakat setempat, TAGANA, maupun tokoh masyarakat. Pada tahap ini peneliti melakukan dialog secara langsung agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai data yang diperoleh terkait penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi terfokus pada bahan-bahan tertulis maupun dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Studi dokumentasi menjadi penting untuk mendukung dan memperkuat analisis data lapangan. Peneliti melakukan pengumpulan sejumlah catatan dan mengambil beberapa gambar selama proses pengumpulan data berlangsung dan dengan teknik ini peneliti berharap mendapatkan data yang konkrit.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data sangat penting dalam sebuah penelitian, Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi merupakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁷ Triangulasi adalah menggunakan cara dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi, Wawancara mendalam dan

²⁷ Moleong, J. L. Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung : Remaja Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal.330

dokumentasi untuk sumber data yang sama. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, akurat dan pasti.

Agar data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan adanya uji keabsahan data. Uji tersebut sebagai berikut.

1. *Credibility*, merupakan teknik untuk menguji kepercayaan dari data hasil penelitian yang telah dipersiapkan oleh penelitian, data tersebut meliputi perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan masyarakat agar penelitian tersebut diakui sebagai sebuah karya ilmiah.
2. *Dependability*, merupakan sebuah penelitian yang reliabel, yaitu apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama maka akan mendapatkan hasil yang sama pula,.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

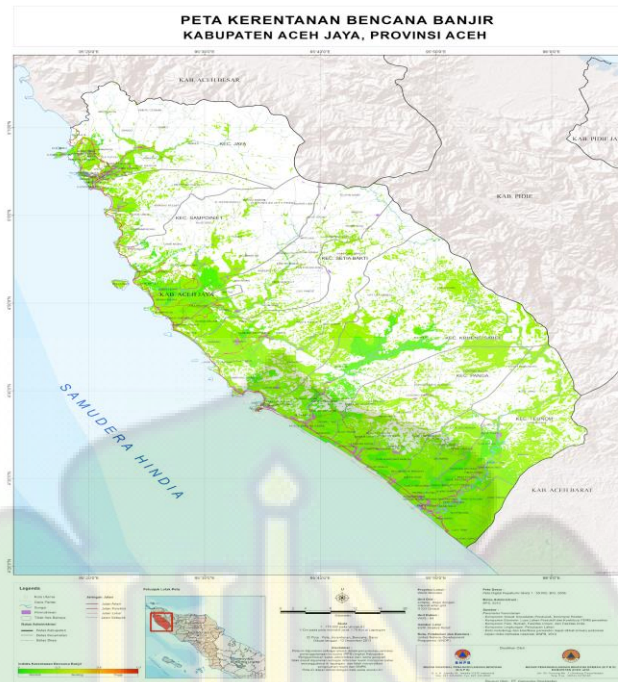
4.1.1 Gambaran Lokasi Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya memiliki luas wilayah 381,400 ha dan terletak pada 04'22 sampai 05'16 garis Lintang Utara dan (°'10 sampai 96'03 Bujur Timur. Yang batas batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Besar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Besar dan Samudra Indonesia, Sebelah Barat dengan Samudra Indonesia, Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat.²⁸

Berdasarkan kedudukan dan letak wilayah kabupaten Aceh Jaya mempunyai posisi yang sangat strategis dan memiliki peluang dalam pengembangan di bidang, industry, perdagangan, dan jasa. Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas 172 Gampong dan 9 Kecamatan yaitu Jaya, Indra Jaya, Sampoinit, Darul Hikmah, Setia Bakti, Krung Sabe, Panga, Teunom, dan Pasi Raya.

Kabupaten Aceh Jaya Merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana banjir terutama di daerah dataran rendah seperti di kecamatan Teunom. Jarak antara Daerah Aliran Sungai (DAS) cenderung rapat. Kerentanan wilayah kabupaten Aceh Jaya dalam bencana banjir dapat dilihat pada gambar berikut :

²⁸ BPS Aceh Jaya dalam angka 2015, (Aceh Jaya Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2015)



Gambar 4.1 Peta Kerentanan Bencana
Sumber : Arsip BPBK Aceh Jaya

Banjir yang melanda beberapa kecamatan di Aceh Jaya khususnya di kecamatan Teunom disebabkan oleh luapan air sungai Teunom yang merupakan salah satu sungai besar yang ada di Aceh dan terhubung dengan sungai di Kabupaten lain. Banjir yang melanda kecamatan Teunom terjadi akibat penebangan hutan secara liar, dan pembuatan tanggul yang belum maksimal oleh pemerintah setempat. Di wilayah Teunom tersendiri banjir terjadi di saat musim penghujan seperti pada bulan September, Oktober, November dan Desember.

a. Kependudukan Di Kecamatan Teunom

Jumlah penduduk di kecamatan Teunom dalam desa ada pada tabel

dibawah ini yang merupakan tabel jumlah penduduk masyarakat di kecamatan Teunom :

Tabel 4.1
Tabel Desa dan jumlah Penduduk di Kecamatan Teunom

001	Lueng Gayo	571
002	Cot Trap	588
003	Pasi Geulima	384
004	Tepin Ara	617
005	Paya Baro	838
006	Pasi Tulak Bala	194
007	Panton	1002
008	Gampong Baro	340
009	Pasi Pawang	275
010	Rambong Payong	320
011	Padang Kleng	1466
012	Keude Teunom	464
013	Alue Ambang	1189
014	Batee-Ro0	331
015	Tanoh Manyang	1655
016	Tanoh Anou	894
017	Blang Baro	452
019	Pasi Timon	526
025	Seumira	200
026	Seuneubok Padang	450
046	Kubu	165
051	Alue Meuraksa	300

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Jaya

Kecamatan Teunom terdiri dari 22 Desa. Di Teunom sendiri ada beberapa desa yang berdampak banjir seperti Desa Pasi geulima, Pasi Tulakbala, Pasi Timon, Panton, Gampong Baro, Pasi Pawang, Rambong paying, Kede Teunom, Alue Ambang, Tanoh Mayang, Dan Blang baro, Padang kleng, Paya Baro, Tepin Ara, Rambong Payong, Pasi Pawang, seperti pada table di bawah ini :

Tabel 4. 2
Tabel Desa yang terdampak banjir di Kecamatan Teunom

NO	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK				Banjir
			KK	LK	PR	JIWA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEUDE TEUNOM	ALUE AMBANG	372	601	544	1.145	√
2		PADANG KLENG	427	724	735	1.459	√
3		PANTON	270	459	436	895	√
4		PASI TULAK BALA	73	107	91	198	√
5		GAMPONG BARO	109	155	155	310	√
6		RAMBONG PAYONG	106	157	161	318	√
7		PASI PAWANG	80	100	119	219	√
8		BLANG BARO	129	193	222	415	√
9		TANO ANOU	239	384	412	796	√
10		TANO MANYANG	472	784	681	1.465	√
11		BATEE ROO	109	170	169	339	-
12		SEUNEUBOK PADANG	175	301	266	567	-
13		SEUMIRA	53	93	100	193	-
14		KUBU	46	79	62	141	-
15		ALUE MEURAKSA	81	136	118	254	-
16	KEUDE TEUNOM		270	242	512	√	
17	PAYA BARO	PAYA BARO	309	466	456	922	√
18		TEUPIN ARA	173	266	290	556	√
19		COT TRAP	173	294	264	558	-
20		LUENG GAYO	146	259	238	497	-
21		PASI GEULIMA	115	159	168	327	√
22	PASI TIMON	137	240	241	481	-	

Sumber : data Arsip BPBK Aceh Jaya

Namun dari empat belas desa yang terdampak banjir ada tiga desa yang paling parah berdampak dan selalu menjadi langganan banjir, Pada umumnya desa desa tersebut terletak di seputar daerah aliran sungai. Seperti yang disampaikan dari hasil wawancara penelitian dengan bapak Suwardi, S.Hi selaku Kepala Sekretariat BPBD Aceh Jaya terkait banjir di Kecamatan Teunom

“Kami dari pihak BPBK sudah berusaha semaksimal mungkin terkait penanggulangan banjir di kecamatan Teunom yang selalu terjadi di Kecamatan Teunom terutama di desa Pasi Geulima, Gampong Baro, dan Blang Baro yang selalu menjadi langganan banjir yang lebih parah dari desa lainnya. Hal ini disebabkan karena desa tersebut terletak di Pinggir sungai atau di seputar daerah aliran sungai.”²⁹



Gambar 4. 2 Banjir yang melanda Desa Gampong Baro
Sumber : Arsip BPBK Aceh Jaya



Gambar 4. 3 Banjir yang melanda Desa Pasi Geulima
Sumber : Arsip BPBK Aceh Jaya

²⁹ wawancara penelitian dengan Kepala Sekretariat BPBD Aceh Jaya pada tanggal 6 juni 2023



Gambar 4. 4 Banjir yang melanda Desa Blang Baro

Sumber : Arsip BPBK Aceh Jaya

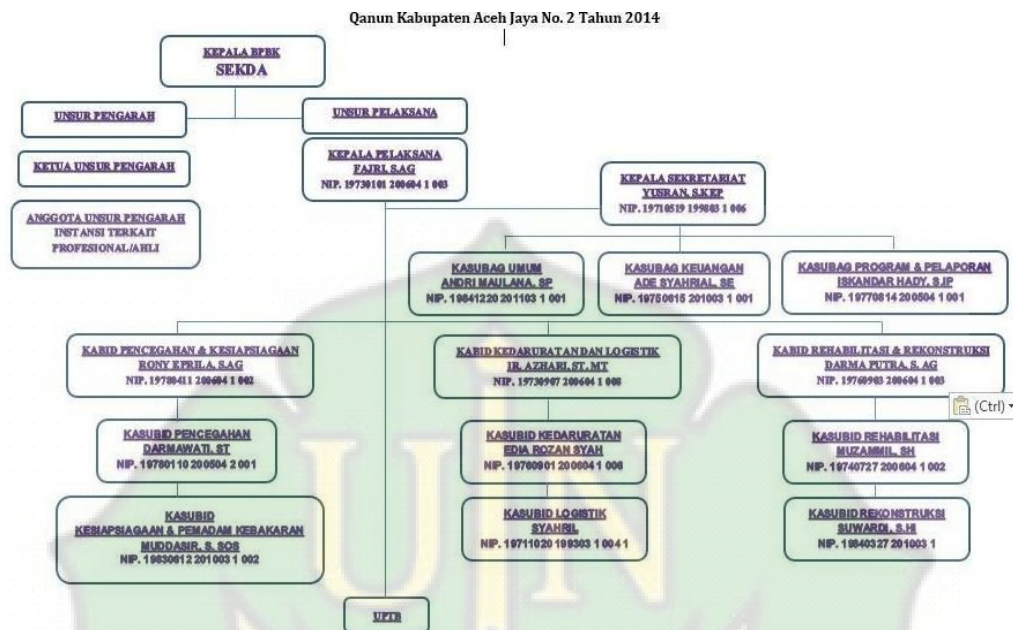
Jadi bencana banjir yang melanda kawasan Teunom merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai. Banjir ini terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama, penyebab lain banjir terjadi di kawasan Teunom yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terhubung dengan Kabupaten lain yang merupakan daerah pegunungan, jadi banjir di Kecamatan Teunom termasuk juga banjir kiriman.

b. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan bencana Banjir di Aceh jaya yaitu :

1) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya (BPBK)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Kabupaten Aceh Jaya dibentuk dengan amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, serta didukung oleh Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 07 Tahun 2016 Tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya. BPBD adalah suatu kerja perangkat daerah yang dibentuk

untuk melakukan tugas dalam bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi BPBD Aceh Jaya

Sumber : Arsip BPBD Aceh jaya

2) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Taruna siaga bencana merupakan organisasi dari Dinas Sosial yang berkolaborasi dengan BPKB aceh jaya sebagai relawan sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang bertujuan dalam penanggulangan bencana dalam bidang sosial. Pada tahun 2002, Taruna siaga bencana dibentuk untuk menyikapi rancangan dalam membangun sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Aceh jaya ditunjuk oleh gubernur aceh yang menjadi tuan rumah dalam bakti sosial dan jambore TAGANA pada tahun 2019.³⁰

³⁰ Lintas aceh. Bupati Aceh Jaya Buka Bhakti Sosial dan Jambore Tagana, Humas Aceh | 14 Juli 2019

Tagana ikut andil dalam penanganan banjir dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya yaitu Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya tentang Penunjukan Nama-nama Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022. Adapun tugas Taruna siaga bencana pada Pra Bencana yaitu :

1. Melakukan pendataan dan penetapan daerah rawan bencana;
2. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan penyuluhan resiko bencana;
3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
4. Melakukan deteksi dini;

Tugas tugas Taruna siaga bencana pada saat Bencana :

1. Melakukan kaji cepat bencana;
2. Identifikasi dan pendataan korban bencana;
3. Melakukan evakuasi korban bencana;
4. Menyiapkan dapur umum;
5. Menyiapkan hunian sementara (HUTERA);
6. Melakukan pendampingan psikososial;

Tugas tugas Taruna siaga bencana pada Pasca Bencana :

1. Melakukan Identifikasi atau pendataan kerugian material kepada korban bencana;
 2. Melakukan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah dan tempat tinggal korban bencana;
 3. Melakukan penataan dan pemulihan sosial dan rujukan;
 4. Melakukan penataan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
-

5. Melakukan pendampingan dalam advokasi social;

Adapun daftar Nama-nama anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya yaitu :

Tabel 4. 3
Daftar Nama-nama Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.

NO	Nama	jabatan	Jenis kelamin	Desa	Kecamatan
1	Irfan Sulaiman	Ketua FK	LK	Ladang Baro	Panga
2	Rizal Dinata	TAGANA	LK	Cot Trap	Teunom
3	Azhari	Sekretaris	Lk	Kerang Mutiara	Panga
4	Zainabah	Bendahara	PR	Sarah Raya	Pasi Raya
5	Darmi	Anggota	LK	Aluambang	Teunom
6	Musliadi	Anggota	LK	Tepin Ara	Teunom
7	Syahrullah	Anggota	LK	Lueng Gayo	Teunom
8	Asadi	Anggota	LK	Lambaroh	Jaya
9	M. Tasir	Anggota	LK	Babah Nipah	Sampointit
10	Putra Juliansyah	Anggota	LK	Dayah Baro	Krung Sabe
11	Iskandar	Anggota	LK	Tuwi kareng	Panga
12	M. Jaddan	Anggota	LK	kabong	Krung sabe
13	Amarullah	Anggota	LK	Gp. Baro	Teunom
14	Ida Suriana	Anggota	PR	Rambong Payong	Teunom
15	Zulfadli	Anggota	Lk	Pasi Tube	Pasi Raya
16	As'ari	Anggota	Lk	Pasi Tube	Pasi Raya
17	M.Nasir	Anggota	Lk	Babah Dua	Indra Jaya
18	Robi Gunawan	Anggota	Lk	Keude Panga	Panga
19	mafri	Anggota	Lk	Seumantok	Sampointit
20	Rusmaidi	Anggota	Lk	Makmur	Krung sabe
21	Muhammad yani Saputra	Anggota	Lk	Ule Gunong	Sampointit
22	Irwansyah	Anggota	Lk	Pante Kuyun	Setia bakti
23	Nurlaili	Anggota	PR	Drien rampak	Setia Bakti
24	Sofyan	Anggota	LK	Menasah Serba	Jaya
25	Aldi Kusma	Anggota	Lk	Suak Unoe	Sampointit

Sumber : Data Arsip Dinas Sosial Aceh jaya

4.1.2 Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, dapat dipahami bawah Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang menyebabkan timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana. penanggulangan bencana sering maknai sebagai paradigma lama yang merespons bencana secara reaktif dan sering dipadankan dengan terminologi pengelolaan kedaruratan.³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekretariat BPBD Aceh Jaya, Kepala Desa dan masyarakat di wilayah Teunom maka untuk mengetahui lebih jauh peran pemerintah Aceh Jaya dalam Penanggulangan bencana banjir peneliti menggunakan indicator indicator meliputi.

a. Agenda Kebijakan

Kebijakan publik dalam definisi Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Makna dari Dye adalah menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik dilakukan maupun tidak dilakukan adalah kebijakan. Definisi kebijakan menurut Dye di tersebut harus dimaknai dengan dua hal penting yaitu bahwa kebijakan itu harus dilaksanakan

³¹ Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007

oleh suatu instansi pemerintah, kedua kebijakan itu mengandung pilihan akan dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai tingkah laku sejumlah pejabat, kelompok, lembaga pemerintah atau serangkaian pelaku dalam suatu bidang kegiatan tertentu.³²

Berbagai upaya tersebut telah banyak dilakukan seperti persoalan banjir yang terjadi di kawasan Teunom lebih dicermati dari daya dukung DAS (Daerah Aliran Sungai) yang rendah. Disisi lain kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan sumber daya alam akibat penambahan penduduk maupun pengembangan kawasan ekonomi serta kurangnya keterpaduan sektor hulu dan hilir dalam pemanfaatan DAS di kawasan Teunom, mengingat salah satu sungai di aceh jaya terhubung dengan sungai yang ada di pidie jaya menjadi penyebab utama banjir yang terjadi di Aceh Jaya. Namun hasilnya belum seperti yang diharapkan, banjir masih terus terjadi dengan korban dan kerugian yang tidak sedikit.³³

Untuk mempermudah analisis penelitian membagi Agenda Kebijakan menjadi tiga bagian yaitu :

1) Tahapan Pra Bencana atau mitigasi bencana

Tahapan Pra Bencana merupakan langkah untuk mencegah dan mengurangi efek yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2008, mitigasi bencana merupakan rangkaian untuk mengurangi

³² Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

³³ Arief Rosyid, Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan,

resiko terjadinya bencana, baik melalui tahapan pembangunan bersifat fisik maupun meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.³⁴

Pra Bencana dan kesiapsiagaan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana melalui pengelompokan dan langkah yang tepat dimana akan sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dan bencana lainnya. Tindakan ini dilakukan sebelum banjir terjadi seperti berupa sosialisasi yang berupa peringatan akan potensi curah hujan yang lebat dan resiko banjir, sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat menjaga kebersihan selokan. Serta pengusulan pembangunan untuk mencegah banjir yang meluap ke pemukiman penduduk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwardi, S.Hi selaku ketua Sekretariat BPBK Aceh Jaya :

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga kami dari pihak BPBK berkolaborasi dengan instansi lainnya seperti dengan dinas sosial yang ikut serta turun ke lapangan dalam rangka sosialisasi akan datangnya bencana banjir dan hal yang harus dilakukan saat banjir, dan melakukan simulasi membuat peta rawan bencana kami juga berkolaborasi dengan Dinas PU dalam pembuatan tanggul di daerah yang rentan terkena bencana banjir.”³⁵

Sebagaimana wawancara peneliti dengan masyarakat yang terdampak bencana banjir :

“Sebelum terjadinya bencana banjir pihak BPBK memberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tentang akan datangnya bencana banjir dan hal yang harus dilakukan saat banjir, namun pihak BPBK hanya turut membantu di titik yang terdampak banjir paling parah, dan bantuan pun masih belum merata serta diberikan saat bencana banjir sudah tertangani. Untuk saat ini pembangunan tanggul pun belum rata adanya di area perairan sungai Teunom.”³⁶

³⁴ Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2008

³⁵ wawancara peneliti dengan dengan kepala sekretariat BPBK pada tanggal 6 juni 2023

³⁶ wawancara peneliti dengan masyarakat pada tanggal 7 juni 2023



Gambar 4. 6 Jalanan sebelum terjadinya banjir



Gambar 4. 7 Jalanan setelah terjadinya banjir

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak BPBK Aceh Jaya dan instansi lainnya telah berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi penyuluhan kesiapan masyarakat tentang hal yang harus dilakukan saat banjir melanda. Namun bantuan yang dibagikan belum rata di dapatkan oleh korban bencana banjir.

2) Saat Bencana atau tanggap darurat

Kegiatan Saat Bencana merupakan kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, dengan tujuan lain yaitu untuk menyelamatkan korban dan harta benda. sebagaimana Rumusan tentang Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi kegiatan evaluasi korban ke tempat pengungsian sementara, penyelenggaraan dapur umum dan penyediaan obat-obatan. Kepekaan dan tanggap darurat Rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. akibat dari bencana alam tidak dapat dihindari oleh siapapun, untuk mencegah potensi masalah akibat bencana alam yang dapat terjadi, masyarakat perlu dikenalkan dengan bencana berupa informasi yang cukup tentang bencana alam. peran instansi instansi saat bencana dari pihak BPBK menyediakan aset-aset penyelamatan saat banjir melanda, dari Dinas Sosial berupa bantuan masa panik.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak selaku Pusdalops-PB BPBK aceh jaya:

“BPBK Aceh Jaya memberikan bantuan saat terjadinya banjir seperti penyediaan perahu karet, pelampung, penyediaan pos kesehatan dan lain sebagainya. dan pihak BPBK juga turun tangan dalam mengevakuasi korban yang terjebak banjir. serta memberikan bantuan yang berupa sembako kepada korban yang berdampak banjir”³⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak A. Wahyu Hadi.S.st selaku kepala Linjamsos Dinas Sosial Aceh Jaya :

³⁷ wawancara peneliti dengan kepala Pusdalops-PB BPBK aceh jaya pada tanggal 6 juni 2023

“Kami dari pihak Dinas sosial memberikan bantuan Masa Panik kepada korban yang terkena dampak bencana banjir di kecamatan Teunom yang berupa penyediaan tempat pengungsian dalam bentuk tenda di dataran tinggi dan pembuatan dapur umum, serta kami juga menyediakan aset dalam penanggulangan bencana banjir seperti mobil sembako, truck, tenda pengeras suara dan lainnya”³⁸

Kemudian lebih lanjut sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga yang terdampak banjir :

“Saat banjir melanda pihak BPBK Aceh Jaya turun langsung ke lokasi banjir seperti di jalan lalu lintas yang tergenang banjir dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan maka pihak BPBK berjaga di area tersebut. Dan dari instansi lainnya seperti Dinas Sosial mereka memberikan bantuan kepada camat dan disalurkan ke desa desa yang terdampak banjir penyaluran bantuan tersebut masih belum merata kepada masyarakat dan pemberian bantuan berupa membenahi kerusakan yang dialami oleh masyarakat masih kurang”³⁹



Gambar 4. 8 Rumah warga yang terdampak banjir

Sumber : Diolah Peneliti

Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, peneliti dapat, menyimpulkan bahwa pihak BPBK masih kurang siaga ketika

³⁸ wawancara peneliti dengan kepala Linjamsos Dinas Sosial Aceh Jaya pada tanggal 8 juni 2023

³⁹ wawancara dengan warga yang terdampak banjir pada tanggal 7 juni 2023

memberikan penanggulangan seperti pemberian bantuan berupa membenahi kerusakan yang dialami oleh masyarakat belum terlaksana.

3) Pasca Bencana atau Rehabilitas dan Rekonstruksi

Pasca Bencana merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan pasca terjadinya bencana, seperti pemulihan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat. Pada tahap ini terdiri dari tahapan pemberian bantuan kepada korban bencana baik berupa bantuan dalam bentuk material maupun non material. Pada tahapan ini dilakukannya tahapan pembersihan lingkungan pasca bencana banjir sehingga berfungsi secara darurat, dan pelayanan rumah. Dan dalam tahapan rekonstruksi yaitu perbaikan sarana-sarana dan fasilitas umum kehidupan masyarakat seperti sekolah, jalan umum, pasar rumah sakit dan lainnya. Sehingga kehidupan masyarakat dapat normal kembali.

Seperti hasil wawancara peneliti pada kasi Rehabilitasi BPBK Aceh Jaya :

“Di lokasi terjadinya bencana banjir kami bersama warga langsung bergerak cepat dalam proses pembersihan puing yang diakibatkan dari bencana banjir tersebut yang menghalang akses jalan raya, kita juga dibantu oleh personil Damkar serta beberapa instansi lainnya. Akan tetapi bagi kerusakan yang sudah sangat parah dan tidak bisa diperbaiki maka kami berkolaborasi dengan Dinas PU untuk memulai program jangka panjang”⁴⁰

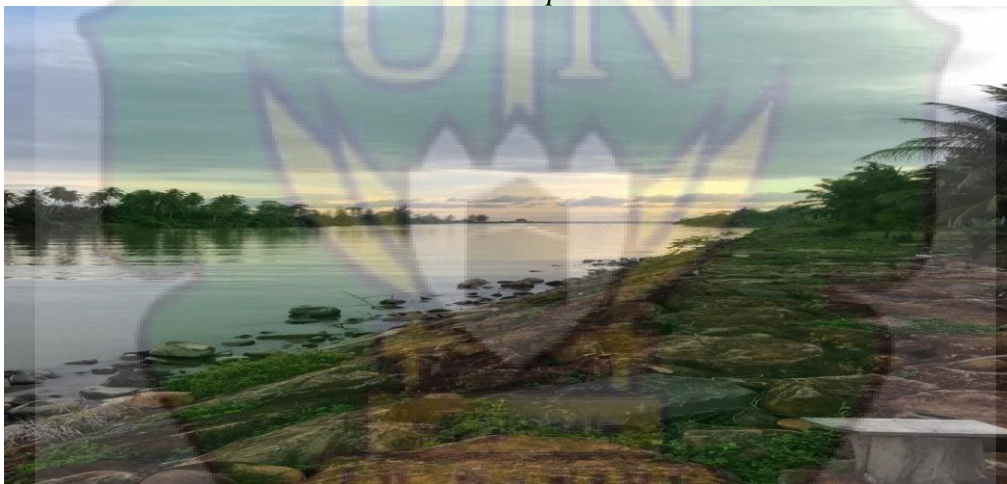
Berdasarkan penentuan informan diatas disini kita dapat melihat bagaimana Intansi-intansi pemerintah dalam membantu proses pertolongan terhadap masyarakat yang terkena bencana.

⁴⁰ wawancara peneliti dengan kasi Rehabilitasi BPBK Aceh Jaya pada tanggal 6 juni 2023



Gambar 4. 9 Tanggul batu gajah di desa Panton

Sumber : Diolah peneliti



Gambar 4. 10 Tanggul batu gajah di desa Panton

Sumber : Diolah peneliti

Tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBK yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Mengidentifikasi masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap bencana dalam lingkungan kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari akan potensi dampak bencana alam.

⁴¹ Sri Heryati, Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana, Jurnal Pemerintahan dan keamanan public, Vol.2 No. 2 (Augustus. 2020). Hal. 143

3. Memberikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana
4. Menjaga hubungan dengan para penanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan tentang pertolongan pertama yang sesuai.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Linjamsos Dinas Sosial Aceh Jaya :

“Dari dinas sosial kami mengirimkan anggota TAGANA yang turun langsung dalam keadaan pasca banjir untuk Melakukan Identifikasi atau pendataan kerugian material kepada korban bencana, Melakukan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah dan tempat tinggal korban bencana, Melakukan penataan dan pemulihan sosial dan rujukan, Melakukan penataan dan pemulihan sosial korban bencana, Melakukan pendampingan dalam advokasi social.”⁴²

Akan tetapi pada saat penelitian mewawancarai masyarakat justru hal berbeda yang peneliti dapatkan. Salah satu masyarakat yang peneliti wawancara menyatakan:

“Menurut saya pihak BPBK masih belum mencapai tujuan yang kami inginkan, namun selalu terkendala dengan lamanya respon dari pihak pusat. permasalahan utamanya adalah anggaran. seperti saat kami mengajukan program pembuatan tanggul di desa Pasi Geulima sampai sekarang tidak ada pembuatan tanggul dan kami harus terbiasa hidup berdampingan dengan bencana banjir.”⁴³

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bawahsannya menurut pandangan masyarakat pihak BPBK dan Instansi lainya belum maksimal dalam kesiapsiagaan dalam rehabilitasi, dan sering menabaikan respon dari kami dengan alasan belum ada anggaran. Namun BPKB tetap terus memberikan upaya untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana.

⁴² wawancara peneliti dengan kepala Linjamsos Dinas Sosial Aceh Jaya pada tanggal 8 juni 2023

⁴³ wawancara peneliti dengan masyarakat gampong Pasi geulima pada tanggal 9 juni 2023

b. Perumusan Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh pembuat kebijakan, pada akhirnya salah satu kebijakan alternatif digunakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara lembaga atau keputusan yudisial.⁴⁴

Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. perumusan yang diterapkan di Aceh jaya dalam penanggulangan banjir yaitu:

- Rumusan tentang Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat dengan BPBK Aceh Jaya mempunyai peran dan tugasnya sangat penting dalam struktur organisasi daerah sebagai salah satu badan yang menangani masalah kebencanaan;
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “ menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”

⁴⁴ William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2000, hlm. 24.

- b. Pasal 5 menyatakan “ pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Pasal 8 menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi : penjaminan pemenuhan hak, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana, pengalokasian dan penanggulangan bencana;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- Pasal 1 (9) UU 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana didefinisikan sebagai; Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Kebijakan Pemerintah terkait mitigasi struktural tentang pembangunan rumah dengan pondasi yang lebih tinggi di kawasan rawan banjir.



Gambar 4. 11 Rumah warga dengan pondasi lebih tinggi di kawasan rawan banjir

Sumber Diolah Peneliti

c. Implementasi kebijakan

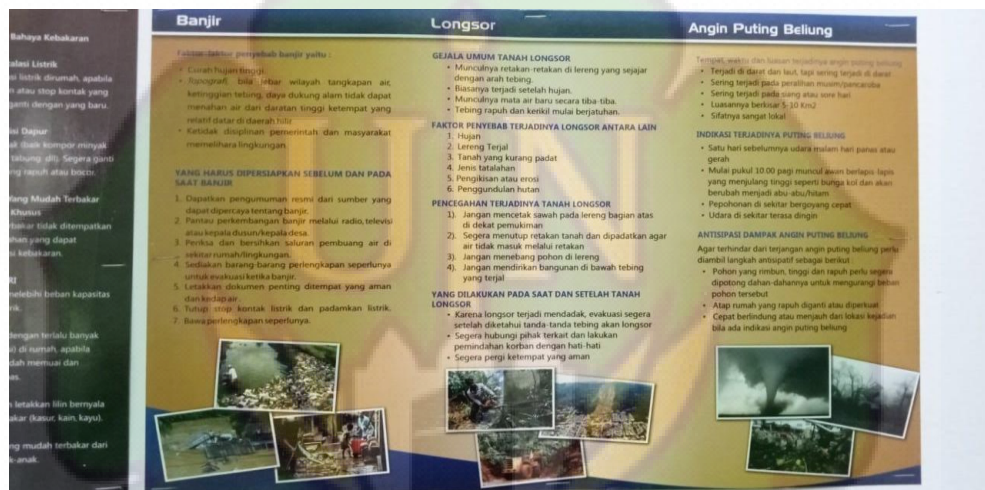
Selanjutnya setelah menyusun kebijakan, maka yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan suatu program kebijakan hanya menjadi suatu program. Jika program tersebut terlaksana maka kebijakan dari program tersebut dijadikan sebagai alternatif pemecah suatu masalah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah yang di tingkat lebih rendah. Kebijakan yang dimiliki oleh suatu unit memobilisasi sumber daya keuangan dan komunitas masyarakat, karena pada tahapan ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.⁴⁵

Pemerintah juga menyarankan agar masyarakat membangun rumah sesuai dengan standar teknis. Dan memperkenalkan program dan system bangunan yang diperbaiki dan dimodernisasi, serta menerapkan peristiwa bencana dalam program penelitian dan pembangunan di masa depan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Darmawati, ST selaku Kasubdit Pencegahan BPBK Aceh Jaya

⁴⁵ Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

“kami dari pihak BPBK Aceh Jaya sudah menurunkan tim supervisi untuk monitoring langsung kelapangan melihat yang mana yang pantas untuk dilakukan perawatan sebelum bencana banjir terjadi dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membangun program sosialisasi di sekolah sekolah contohnya seperti program Tagana MASuk Sekolah (TMS), Kebijakan lain yang bisa diimplementasikan yaitu upaya pengendalian banjir dan dampaknya dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama yaitu memindahkan penduduk yang biasa atau akan terkena banjir, memindahkan banjirnya, mengkondisikan penduduk hidup bersama dengan banjir, Dari 3 pendekatan tersebut yang sering dilakukan adalah mengendalikan banjirnya dan membiasakan penduduk hidup bersama banjir.”⁴⁶



Gambar 4. 12 Brosur himbauan banjir
Sumber : Data Arsip BPBK Aceh Jaya

Dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya (BPBK) dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah telah berfungsi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat cepat mendapatkan penanganan ketika bencana banjir melanda.

⁴⁶ wawancara peneliti dengan KASubbid Pencegahan BPBK Aceh Jaya pada tanggal 6 juni 2023

d. Evaluasi Kebijakan

Ada 2 tipe dalam evaluasi, diantaranya *Formative Evaluation* yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat sebuah kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya terdapat analisis yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan kondisi-kondisi yang mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut. Fase implementasi membutuhkan evaluasi *formatif*, yang akan memonitor kemana arah dijalankannya program sehingga dapat menyediakan umpan balik yang mungkin digunakan untuk pengembangan perbaikan proses implementasi. Dan *Summative Evaluation* Evaluasi sumatif digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang telah ditujukan di awal.

Evaluasi sumatif masuk dalam tahap post implementation, yakni dilakukan ketika kebijakan program sudah selesai digunakan, dan dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan tertentu. Tipe evaluasi sumatif ini menekankan pada hasil yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan.⁴⁷

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang Perlindungan dan Jaminan sosial :

“Kami membuat program pembangunan tanggul di kecamatan Teunom, untuk mencegah banjir meluap ke pemukiman warga, dan kami membuat tanggul sementara dari karung pasir saat banjir melanda dan saat banjir surut anggota kami turun ke lapangan untuk pengecekan tanggul-tanggul

⁴⁷ Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, US: Edward Elgar Publishing Company, 1995, hlm. 543

*mana saja yang mengalami kerusakan sesuai dengan anggaran yang ada, serta membagikan brosur untuk meningkatkan kewaspadaan bencana banjir*⁴⁸

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Blang Baro yaitu salah satu desa yang terdampak parah banjir di kecamatan Teunom :

*“Benar adanya di desa kami telah di bangun tanggul karna desa kami merupakan desa yang terletak di samping sungai jadi setiap hujan lebat melanda aliran sungai selalu meluap ke pemukiman dan jalanan di desa kami, namun ada beberapa titik sudah bocor ada pembuatan tanggul belum rata adanya di seluruh pinggiran sungai Teunom jadi ada beberapa desa yang masih berdampak banjir”*⁴⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala desa Pasie gelima :

*“Pihak BPBk dan Dinas Sosial melakukan sosialisasi terkait banjir ke sekolah sekolah, dan saat banjir melanda mereka menolong warga yang terjebak dalam banjir. Namun karna Desa kami menjadi langganan banjir saat musim penghujan biasanya banjir hanya setinggi satu meter di dalam maupun diluar rumah. Tetapi kami butuh kebijakan khusus terkait jalanan sampai saat ini belum di aspal karena pondasinya selalu rusak akibat banjir, pada tahun kemarin kami sudah mengajukan program pembuatan tanggul dan sudah dilakukan survey lokasi namun sampai saat ini belum ada pembangunan apa pun”*⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan kepala bidang Perlindungan dan Jaminan sosial pada tanggal 6 juni 2023

⁴⁹ wawancara peneliti dengan kepala desa Blang Baro pada tanggal 7 juni 2023

⁵⁰ Wawancara peneliti dengan kepala desa Pasi Geulima pada tanggal 9 juli 2023



Gambar 4. 13 Tagana Masuk Sekolah (TMS) di SMK 1 Teunom
Sumber : Diolah Peneliti

Jadi Dapat disimpulkan bahwa dari pihak BPBK hanya melakukan program pembuatan tanggul tetapi belum ada pengecekan terkait kerusakan tanggul dan pembangunan Tanggul di titik yang sering terdampak bencana banjir dikarenakan kurangnya anggaran.

4.1.3 Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam Penanggulangan banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 Ayat 6 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Mitigasi merupakan upaya mengurangi resiko bencana. Yang melalui tahapan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.⁵¹

⁵¹ PP No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Mitigasi bencana berbasis komunitas adalah pekerjaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh dan bersama komunitas di mana mereka berperan sebagai kunci sejak perencanaan, desain, penyelenggaraan, pengawasan, hingga evaluasi program. yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan strategi dari BPBD kabupaten Aceh Jaya dalam penanganan banjir berbasis komunitas.

a. Mitigasi Struktural dalam Aspek Fisik

Seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 yang berkaitan dengan mitigasi bencana diantaranya :

- Setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
- Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
- Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

Upaya untuk meminimalkan bencana melalui penerapan pengurangan risiko berbasis komunitas yang dilakukan melalui proses pembangunan berbagai prasarana fisik atau infrastruktur yaitu seperti pembuatan pondasi rumah yang

tinggi di kawasan rawan banjir, hal ini sudah diterapkan sejak lama dikarenakan Teunom dari zaman sudah mengalami bencana banjir. dan masyarakat membuat tumpukan karung pasir sebagai tanggul sementara di bibir sungai yang belum di bangun tanggul permanen oleh pemerintah, serta membuka hulu dan hilir agar aliran sungai tidak meluap ke darat.

Pada tahapan ini, Pihak BPBK Aceh Jaya baru memulai membangun atau memperbaiki sesuatu untuk mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi di kecamatan Teunom sebagaimana wawancara peneliti dengan Kasi Rehabilitas yang menyatakan bahwa :

“kami dari pihak BPBK Aceh Jaya telah bekerja sama dengan Dinas PU dalam membangun tanggul batu gajah di beberapa wilayah aliran sungai di kecamatan Teunom, pembuatan tanggul merupakan usulan dari warga setempat. dan dari pihak masyarakat membantu dalam membuat tumpukan karung pasir di sekitar bibir sungai. hal ini karena kurangnya anggaran yang diterima dari pemerintah pusat tetapi kami sudah merencanakan untuk melanjutkan pembangunan tanggul di wilayah lainnya. Pasca bencana kami dan juga masyarakat setempat juga memperbaiki jalan atau jembatan yang rusak dengan menggunakan jembatan sementara dari pohon kelapa dan kami juga turut serta membersihkan akses jalan yang tetap banjir. Serta kami juga bekerja sama dengan Baitul Mal dalam memberikan bantuan rumah terhadap korban banjir yang rumahnya terseret arus. ”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat sudah paham bagaimana menghadapi dan bersiap siaga dalam pengurangan risiko banjir yaitu dimana masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana banjir membangun rumah dengan pondasi yang lebih tinggi dan membuat tanggul dari karung pasir sebagai tanggul. pemerintah Aceh jaya sudah melakukan pembuatan tanggul di beberapa wilayah bibir sungai teunom sebagai bentuk pengurangan

risiko banjir, Namun karena kurangnya anggaran tanggul belum bisa dibuat di seluruh wilayah yang terdampak banjir.

b. Mitigasi Non Struktural dalam Aspek Sosial

Upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari upaya pada mitigasi struktural yang meliputi upaya pembuatan kebijakan, seperti upaya pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, legislasi perencanaan wilayah dan tata ruang dan upaya pelatihan kebencanaan dan asuransi.

Dalam mitigasi Non struktural upaya mengurangi dampak bencana banjir yaitu melalui kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan terkait banjir, di Kecamatan Teunom sendiri pencegahan tersebut diberitakan melalui pengumuman di masjid-masjid tentang terjadinya banjir di kawasan pinggir sungai, dan memberitakan kesiapsiagaan masyarakat agar berjaga-jaga sebelum banjir meluap ke desa-desa yang lain. kebijakan dari mitigasi tersebut dilakukan untuk masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana.

Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, Advokasi, Pendampingan). Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Badan penanggulangan Bencana daerah di kabupaten Aceh jaya bekerja sama dengan Dinas Sosial dan instansi instansi lainnya dalam masa tanggap darurat bencana sebagaimana wawancara peneliti dengan BPBD Aceh Jaya :

“Kami dari pihak BPBD berkolaborasi dengan instansi instansi pemerintah lainnya seperti dengan Dinas Sosial mereka yang memberikan bantuan masa panic kepada korban bencana banjir. Dalam bantuan masa panic pihak TAGANA dan KSB sebagai penyelamat utama seperti masak bersama di dapur umum dan turut membantu korban yang terjebak banjir”

hal tersebut dibenarkan oleh Dinas sosial sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ketua bidang Linjamsos :

“kami dari dinas sosial hanya bisa membantu bantuan dalam masa panic yang berupa bantuan sembako dan tenda darurat, kami juga menyediakan kendaraan khusus dalam tanggap darurat bencana. Dan dari Dinas Sosial tim TAGANA turun langsung untuk Melakukan Identifikasi atau pendataan kerugian material kepada korban bencana, dan juga melakukan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah dan tempat tinggal korban bencana melalui data yang dicatat oleh anggota TAGANA yang melakukan penataan dan pemulihan sosial dan rujukan, serta Melakukan penataan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya dan Melakukan pendampingan dalam advokasi social”



Gambar 4. 14 Pelatihan dapur lapangan dari TAGANA

Sumber : Arsip Dinas Sosial Aceh Jaya

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak BPBK telah bekerja sama dalam masa tanggap darurat bencana yaitu dengan berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas PU, Baitulmal dan instansi lainnya.

4.1.4 Kebijakan Sosial Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom

Kebijakan sosial dibagi kedalam dua aspek. Pertama, kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. Dan yang kedua, yaitu kebijakan sosial dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.⁵²

kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat dilihat dari program-program pelayanan sosial dan bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesehatan, pelayanan sosial di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan serta layanan sosial personal. Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan sosial yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi kualitas kehidupan manusia.

a. Kebijakan Sosial dalam program-program pelayanan sosial

BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya memberikan jaminan kepada masyarakat yang terkena dampak dari bencana, yaitu dengan merencanakan tempat pengungsian, pembagian sembako, pembuatan dapur umum, pemberian rumah bantuan layak huni, sehingga apabila terjadinya banjir, masyarakat akan

⁵² Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), "Introduction: Social Policy and Social Welfare" dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage, halaman xi-xv

lebih aman dari dampak bencana banjir tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penelitian dengan bapak Suwardi, S.Hi selaku Kepala Sekretariat :

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan bantuan logistic dan bekerja kami sama dengan dinas sosial, kami dari pihak BPBD langsung turun tangan yaitu dengan membagi tim penanggulangan bencana, memberikan penyuluhan-penyuluhan dan merelokasikan korban secara bertahap dan kami dibantu oleh Mustika, Tim Sar, dan TNI di kecamatan setempat dalam melakukan pemantauan lalu lintas yang terdampak banjir dan membantu kendaraan yang melintas agar tidak terseret arus. Banjir yang terjadi di kecamatan teunom bukanlah banjir bandang melainkan banjir genangan yang berupa banjir kiriman dari Tangse pidie jaya, karena aliran sungai tangse terhubung dengan aliran sungai Teunom, jadi ketika hujan lebat melanda Tangse air tersebut langsung memenuhi sungai Teunom maka dari itu pihak BPBK hanya bisa membantu dengan pembuatan tanggul sementara, pengerukan sungai dan penyediaan pos pengungsian serta transportasi yg berkaitan dengan banjir seperti bot pelampung dan excavator. Tapi kadang kala banyak masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan dari kami kurang efisien dan tidak tepat waktu, dan hal itu kami jadikan sebagai saran dan kritikan untuk bias lebih maksimal lagi”⁵³

BPBD berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam penanggulangan banjir seperti dengan dinas sosial dan lembaga lainnya dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena banjir, sebagaimana hasil dari wawancara peneliti dengan Dinas sosial yaitu bapak A. Wahyu Hadi.S.St. selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial :

“kami dari pihak dinas sosial berkontribusi juga dalam penanganan banjir dari dinas sosial kami membantu dalam penanganan masa panic yaitu seperti adanya dapur umum, penyewaan tenda pengungsian. Dan dari Dinas sosial kami membentuk organisasi TAGANA(Taruna Siaga Bencana) dari pihak tagana mereka turun serta dalam penanganan bencana Masa Panik disini keterlibatan tagana adalah membantu dalam Dapur umum bencana, dan dalam upaya pengurangan resiko TAGANA melakukan Identifikasi atau pendataan kerugian material kepada korban bencana,

⁵³ wawancara penelitian dengan bapak Suwardi, S.Hi selaku Kepala Sekretariat pada tanggal 6 juni 2023

Melakukan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah dan tempat tinggal korban bencana serta TAGANA juga melakukan penataan dan pemulihan sosial dan rujukan .”⁵⁴

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh BPBD Aceh Jaya kepada masyarakat akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman, sebagaimana hasil dari wawancara peneliti kepada masyarakat :

“Pada saat terjadinya bencana banjir pihak BPBD langsung turun yaitu dengan membagi tim penanggulangan bencana. tim penanggulangan bencana membantu kami di area jalan lintas yang menghambat lalu lintas yang biasanya terjadi di desa Gampong Baro. hampir setiap banjir terjadi disini selalu menghambat lalu lintas. Disini mungkin kami sangat butuh peran dari BPBD dalam penanganan banjir yang menghambat jalan raya , selain menghambat jalan raya banjir di kampung kami sangat merugikan dalam sektor pertanian dan peternakan dimana semua hasil tani kami gagal panen dan banyak peliharaan kami yang mati akibat kadangnya terlalu lama terdampak banjir. Sementara pihak TAGANA juga membantu dalam penyediaan makanan dan tempat untuk korban bencana banjir.”⁵⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh kepala desa Blang baro kepada peneliti yaitu :

“Banjir selalu menimpa perkampungan kami terutama pada bulan penghujan biasanya pada bulan yang berakhiran ber seperti bulan September, oktober Desember dan November kami selalu bersiap siaga dan kami akan memindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi dan bergotong royong membersihkan selokan. Desa kami menjadi langganan banjir walau tidak selalu parah saat musim penghujan. Sebelum adanya tanggul hamper saat musim penghujan desa kami terdampak banjir tapi setelah adanya tanggul yang dibuat pada tahun 2017 lalu, banjir hanya terjadi ketika adanya banjir kiriman dari daerah lain. Tapi sangat disayangkan sekarang kondisi tanggul sudah mengalami kerusakan dan belum diperbaiki..”⁵⁶

⁵⁴ wawancara peneliti dengan Dinas sosial yaitu bapak A. Wahyu Hadi.S.St. selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tanggal 8 juni 2023

⁵⁵ wawancara peneliti kepada masyarakat pada tanggal 7 juni 2023

⁵⁶ wawancara peneliti dengan kepala desa Blang baro pada tanggal 7 juni 2023



Gambar 4. 15 Jalanan setelah terjadinya banjir

Sumber : Diolah Peneliti

Jadi Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, BPBK dan instansi lainnya sudah berusaha dalam penanggulangan bencana seperti memberikan jaminan hak kepada masyarakat yang terdampak bencana. Namun belum ada kebijakan tentang perbaikan tanggul yang rusak dan program pembuatan tanggul di bibir sungai teunom belum merata.

b. Kebijakan sosial dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial dimana manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Dimana tujuan dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945 melalui pelayanan sosial yang diwujudkan dengan usaha kesejahteraan sosial.⁵⁷

Dinas sosial dalam upaya mewujudkan program Kesejahteraan sosial memberikan tanggung jawab nya kepada Taruna Siaga Bencana yaitu yang bertugas untuk :

⁵⁷ Edi Suharto, Ph.D. Analisis Kebijakan Publik : panduan praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. ALFABETA 2005

1. Melakukan Identifikasi atau pendataan kerugian material kepada korban bencana
2. Melakukan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah dan tempat tinggal korban bencana
3. Melakukan penataan dan pemulihan sosial dan rujukan
4. Melakukan penataan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait
5. Melakukan pendampingan dalam advokasi sosial

Dan Dinas sosial juga membuat program Kesejahteraan sosial yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB) Dimana terletak di kecamatan Teunom yaitu di Desa Rambong Payong program KSB tersebut berfungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana
2. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat
3. Memperkuat interaksi sosial masyarakat
4. Mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana
5. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan.



Gambar 4. 16 Pelatihan dan penguohan KSB di desa Rambong Payong kecamatan Teunom

Sumber : Data Arsip Dinas Sosial

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan wawancara peneliti dengan Dinas sosial yaitu bapak A. Wahyu Hadi.S.St. selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

“kami juga membentuk organisasi Kampung Siaga Bencana di kecamatan Teunom tepatnya di desa Rambong payong yang di ketuai oleh bapak Fajri selaku warga desa rambong payong. jadi KSB bertujuan untuk Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana dan lainnya.”⁵⁸

Jadi dapat disimpulkan dalam bidang kesejahteraan sosial sudah diwujudkan oleh Dinas Sosial melalui program Kampung Siaga bencana dalam mewujudkan kesejahteraan desa yang terdampak dari bencana banjir tersebut.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penanggulangan Banjir di Wilayah Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, dapat dipahami bawah Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang menyebabkan timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dinas Sosial dan BPBK Aceh Jaya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak terjadinya bencana banjir tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBK dan Dinas sosial yaitu dari pihak Dinas Sosial menyediakan bantuan masa panik dan dan penyediaan pengungsian untuk korban bencana serta

⁵⁸ wawancara peneliti dengan Dinas sosial pada tanggal 8 juni 2023

Melakukan pendataan dan penetapan daerah rawan bencana, melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan penyuluhan resiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Melakukan deteksi dini dan Dinas sosial juga membantu saat Bencana yaitu dengan melakukan kaji cepat bencana, identifikasi dan pendataan korban bencana, melakukan evakuasi korban bencana, dan melakukan pendampingan psikososial.

Dari pihak BPBK Aceh Jaya berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan telah efisien dalam pemecahan bencana, Dan pihak BPBK bekerja sama dengan instansi-instansi lain dalam penanggulangan bencana seperti bekerja sama dengan Dinas PU dalam memperbaiki jalan yang rusak, dan bekerja sama dengan Baitul Mal dalam pemberian bantuan rumah kepada korban bencana banjir yang rumahnya terbawa arus. Namun dalam proses turun lapangan BPBK masih kurang siaga ketika memberikan penanggulangan, dan kurang dalam bantuan berupa membenahi kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak bencana banjir ini, seperti melakukan sosialisasi penyuluhan dan menyebarkan brosur, menempatkan relawan-relawan pada setiap daerah yang rawan bencana. namun dalam hal mengevaluasi masyarakat, pemerintah kurang cepat tanggap untuk ikut membantu. Upaya yang dilakukan pertama yaitu penanggulangan :

a Tahapan Pra Bencana

Kegiatan pada tahap ini yaitu tahapan pencegahan, yaitu dapat dilihat dari strategi berupa sosialisasi kepada masyarakat, melakukan simulasi membuat peta

rawan bencana, hal tersebut dianggap sudah efektif dikarenakan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait edukasi kebencanaan.

b. Tahapan Pada Saat Terjadinya Bencana

Pada tahapan ini keterlibatan BPBK sangat dibutuhkan untuk menanggulangi dan membantu mengevaluasi masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber pihak BPBK masih kurang siaga ketika memberikan penanggulangan seperti pemberian bantuan berupa membenahi kerusakan yang dialami oleh masyarakat belum terlaksana.

c. Tahapan Pasca Bencana

Pada tahapan ini pihak BPBK bidang rehabilitasi mempunyai peran yang penting terhadap penanggulangan bencana, diantaranya berperan sebagai :

1. Mengidentifikasi masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap bencana dalam lingkungan kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari akan potensi dampak bencana alam.
3. Memberikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana
4. Menjaga hubungan dengan para penanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan tentang pertolongan pertama yang sesuai.

Namun pada tahapan ini belum terlaksana sepenuhnya juga dikarenakan kurangnya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana dari pusat.

4.2.2. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam penanggulangan banjir di Wilayah Tenom oleh Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 Ayat 6 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Mitigasi merupakan upaya mengurangi resiko bencana. Yang melalui tahapan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan sebuah organisasi pemerintah yang diharapkan dapat menangani permasalahan kebencanaan di daerah terutama di sekitar masyarakat sehingga perlu untuk mengetahui sejauh mana peran dan strategi dari BPBD kabupaten Aceh Jaya dalam penanganan banjir berbasis komunitas.

1. Mitigasi Struktural dalam Aspek Fisik

Pihak BPBK Aceh Jaya baru memulai membangun dan memperbaiki sesuatu untuk mengurangi dampak bencana banjir yang terjadi di kecamatan Teunom. sebagaimana wawancara peneliti dengan pihak BPBK Aceh Jaya, pemerintah Aceh jaya sudah melakukan pembuatan tanggul di beberapa wilayah bibir sungai teunom. Namun karena kurangnya anggaran tanggul belum bisa dibuat di seluruh wilayah yang terdampak banjir. Dan pihak komunitas membantu dalam pembuatan tanggul sementara seperti tumpukan karung pasir di bibir sungai serta membuka dan memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS). Pihak komunitas bekerja sama pemerintah dalam penanggulangan banjir dalam pembuatan tanggul

sementara, dan dari pihak masyarakat melakukan pantangan yang dianggap dapat menghadirkan musibah seperti acara Tulak bala dimana masyarakat memberikan makanan kepada pengguna jalan.

2. Mitigasi Non Struktural dalam Aspek Sosial

Dalam mitigasi Non struktural upaya mengurangi dampak bencana banjir melalui pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan terkait banjir, di Kecamatan Teunom sendiri pencegahan tersebut diberitakan melalui pengumuman di masjid-masjid tentang terjadinya banjir di kawasan pinggir sungai, dan memberitakan kesiapsiagaan masyarakat agar berjaga-jaga sebelum banjir meluap ke desa-desa yang lain. kebijakan dari mitigasi tersebut dilakukan untuk masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana.

Upaya untuk mengurangi dampak bencana banjir yang dilakukan pemerintah selain dari upaya pada mitigasi struktural yang meliputi upaya pembuatan kebijakan, seperti upaya pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, legislasi perencanaan wilayah dan tata ruang dan upaya pelatihan kebencanaan dan asuransi. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, Advokasi, Pendampingan). Dan Pihak BPBK Aceh Jaya juga berkolaborasi dengan instansi-instansi lainnya. Seperti adanya sumbangan dari pihak pihak kampus melalui galang dana mahasiswa.

4.2.3. Kebijakan Sosial Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom

kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat dilihat dari program-program pelayanan sosial dan bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesehatan, pelayanan sosial di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan serta layanan sosial personal. Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan sosial yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. yaitu dengan membuat kebijakan yaitu tentang program pelayanan sosial dan program pelayanan kesejahteraan.

1. Kebijakan Sosial dalam program-program pelayanan sosial

Yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat yang terkena dampak dari bencana dengan merencanakan tempat pengungsian, pembagian sembako, pembuatan dapur umum, dan pemberian rumah bantuan layak huni, sehingga apabila terjadinya banjir, masyarakat akan lebih aman dari dampak bencana banjir tersebut.

2. Kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial dimana manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Dimana tujuan dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Dalam program pelayanan dan program kesejahteraan masyarakat pihak BPBK sudah diwujudkan oleh Dinas Sosial melalui program Kampung Siaga bencana dalam mewujudkan kesejahteraan desa yang terdampak dari bencana banjir tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme penanggulangan bencana banjir yang dilakukan dengan melalui a. setting kebijakan yang terfokus pada tahapan pra bencana, saat bencana terjadi, kemudian pasca bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana secara komprehensif. Kemudian b. perumusan kebijakan meliputi; layanan sosial dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya c. implementasi kebijakan difokuskan pada aspek fisik dan non fisik. Sedangkan d, evaluasi kebijakan meliputi pada formative evaluasi pada kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang didalamnya terdapat analisis yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan kondisi-kondisi yang mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut dan summative evaluasi yang dilakukan dengan melihat dampak dari sebuah kebijakan penanggulangan banjir di kawasan Teunom Aceh Jaya. Penanggulangan bencana banjir yang dilakukan pemerintah daerah masih terfokus pada aspek pembangunan fisik dibandingkan dengan aspek non fisik.
2. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) diarahkan pada bentuk mitigasi bencana pada aspek fisik dengan pembangunan

tanggul di kawasan rawan banjir. Sedangkan pada aspek mitigasi non struktural dalam aspek sosial mengarah pada bentuk bantuan pada masa bencana dan pasca bencana.

3. Bentuk kebijakan sosial penanggulangan banjir berbasis komunitas dilakukan melalui pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial . Pelayanan sosial dilakukan merencanakan tempat pengungsian, pembagian sembako, pembuatan dapur umum, dan pemberian rumah bantuan layak huni, sehingga apabila terjadinya banjir, masyarakat akan lebih aman dari dampak bencana banjir tersebut. Sedangkan kesejahteraan sosial memetakan wilayah banjir dan membentuk kampung siaga bencana.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat dilakukan :

1. Diperlukan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan banjir yang selama ini masih lemah sehingga penanggulangan banjir masih terfokus pada pembangunan fisik semata, dan masih lemah pada aspek mitigasi bencana secara sosio-kultural.
2. Diperlukan penataan ulang kawasan banjir untuk lebih terfokus nya mitigasi bencana, baik dalam bentuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
3. Mengembangkan gampong siaga bencana secara lebih menyeluruh dalam lingkup kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A., W. S. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Edi, S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edi, S. (1997). *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerja sosial*. Bandung: LSP Press.
- Heryanti, S. (2020). *Peran Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Midgley, James, Tracy, M. B., & Livermore, M. (2000). *Social Policy And Social Welfare*. London: Sage.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Parsons, Wayne;. (1995). *Introduction to the Theory and Practice of Policy*. US: Publishing Company.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winamo, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zastrow, C. (2009). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Cengage: Learning.

Jurnal/Skripsi:

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 15-25.
- Bessant, J., Watts, R., Dalton, T., & Smyth, P. (2006). *Talking Policy*. London: Routledge.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal PUBLISIA*, 3(2), 32-38.
- Febriansyah, M. (2019). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Jurnal Shere Social Work*, 1-12.
- Findayan, A. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, 12-20.
- Handayani, D. A. (2022). Strategi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Konservasi Taman Budaya Nasional Gunung Merapi. *Lilbang Sukowati*, 6(1), 65-78.
- Jaya, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrat.
- Pramono, R. (2016). Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18 (1), 75-87.
- Riska, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(2), 25-32.
- Rosyid, A. (2013). Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 20-30.

Peraturan dan Website Pemerintah:

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang penetapan nama-nama petugas TAGANA terhadap kesiapan bencana.

Kajian Risiko Bencana Aceh 2016-2020, BPBA Aceh, Tahun 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6. Kegiatan ...

Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 611/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Siti Nur Zalikha, M.Si. | Sebagai pembimbing I |
| 2. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. | Sebagai pembimbing II |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Intan Karnia Sari |
| NIM | : 190802094 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara |
| Judul | : Kebijakan Sosial Dalam Penanganan Banjir Berbasis Komunitas di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya |
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1083/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dinas sosial Aceh Jaya, BPBK Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INTAN KARNIA SARI / 190802094**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Desa Pantan kec. Teunom Kab. Aceh Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENANGANAN BANJIR BERBASIS KOMUNITAS DI KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2023

an. Dekan

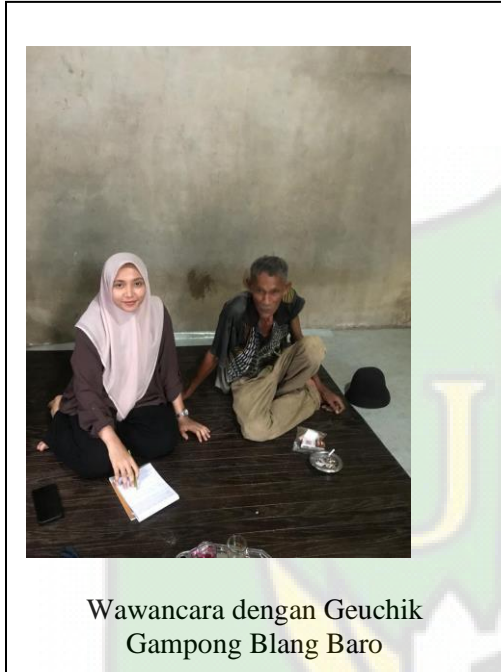
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 05 Desember
2023*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian





Wawancara dengan Geuchik
Gampong Pasi Geulima

